

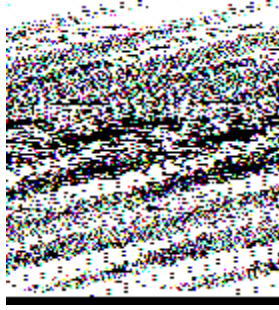


RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI 2023



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGAWI
2022**



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 140 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
36. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 163 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 163 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 163);
37. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 5 Agustus 2022



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

Mokh. Sodik Triwidiyanto
MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 149

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 140 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023 merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Dalam rangka itu diperlukan penerapan sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis, sehingga pelaksanaan program kerja masing-masing Satuan kerja Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja merupakan hasil sinkronisasi rancangan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam implementasinya agar berjalan sesuai perencanaan, kebijakan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sangat memerlukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat, diantaranya perilaku masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas infrastruktur secara baik dan tertib agar infrastruktur perhubungan yang berupa Traffic Light, Rambu rambu, alat pengujian tidak cepat rusak dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan umur rencana.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD telah mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Aturan pelaksanaan ini ditindaklanjuti melalui Permendagri Nomor 54

Tahun 2010 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain:

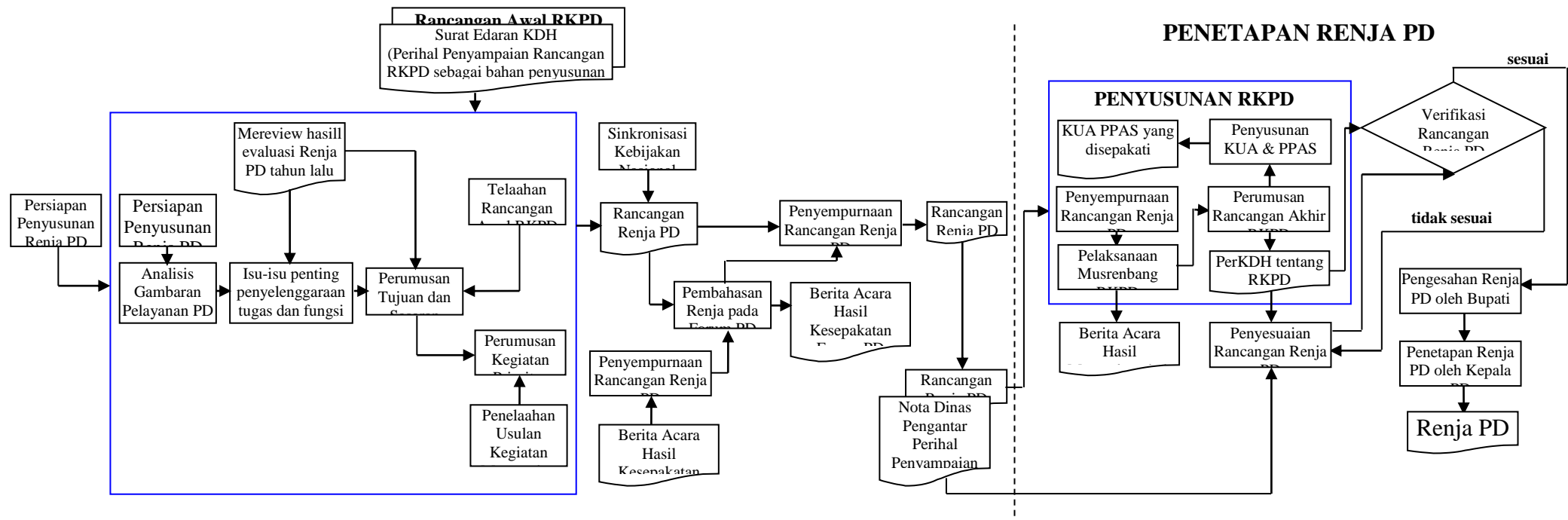
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun tahapan penyusunan Renja PD Dinas Perhubungan meliputi :

- a. Persiapan Penyusunan,
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir dan
- f. Penetapan

Sesuai dengan bagan alir sebagai berikut :

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD



Gambar 1. Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja PD

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah .

Adapun keterkaitan Renja dengan RKPD dapat dilihat pada bagan berikut ini :

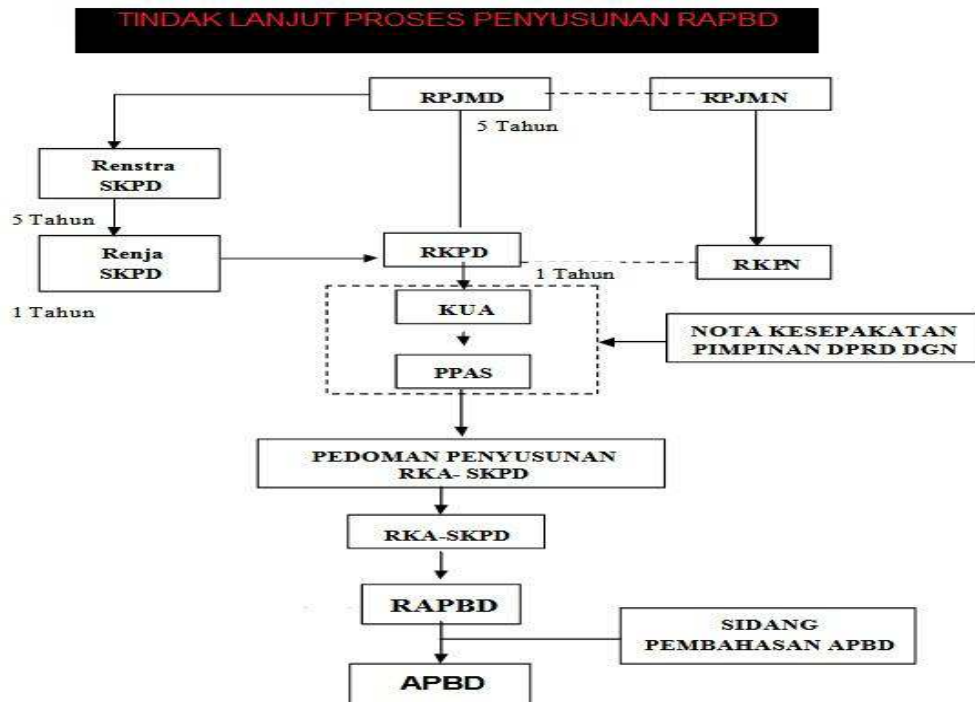


Adapun keterkaitan Renja dengan Renstra PD dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Penyusunan Rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi mengikuti tahapan sebagaimana terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah , tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja perangkat daerah. Pada akhirnya Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat Daerah untuk Penyusunan Rancangan APBD seperti bagan berikut ini :



1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja PD (Renja-PD) Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan anggaran selama 1 (satu) tahun dan merupakan implementasi pelaksanaan dari RPJMD dan Renstra, Sebagai acuan dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi secara berkesinambungan.

b. Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi bertujuan :

1. Untuk Pelayanan PD Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
2. Sebagai bahan acuan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan PD Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
3. Sebagai dokumen perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi secara sistematis dan terorganisir.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dishub Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat daerah , proses penyusunan renja perangkat daerah , keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah dengan renja serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (Reviw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK

2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dampak terhadap capaian Visi dan Misi kepala Daerah. Tantangan dan

peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan hasil penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Menjelaskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. Dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program /kegiatan pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan

- b. Kaidah kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir di cantumkan tempat dan tanggal dokumen , nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat daerah , serta Cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Lampiran-Lampiran

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan ATCS (Area Trafic Control Sistem) di kabupaten ngawi sudah terealisasi sedang untuk penambahan pagu anggaran dana hibah 350.000.000,00 tidak bisa di realisasikan karena Proses Waktu Pengadaan Pagu Anggaran Kurang Cukup Waktunya/ tinggal 2 bulan dan Dipa Anggaran polres sudah di dok (waktunya sudah mepet untuk pelaksanaannya)

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi dianalisis dari segi pencapaian IKU Dinas Perhubungan .

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilakukan melalui penetapan indikator kinerja berupa ukuran kuantitatif dan kualitatif.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi meliputi :

“Rasio kecelakaan lalulintas terhadap jumlah kendaraan “

Evaluasi capaian renja tahun lalu dengan target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021, dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten /Kota
 Indikator : Persentase sarana dan prasarana Perhubungan dalam kondisi baik
 Target : 100 %
 Realisasi : 99,03 %
 Pencapaian : 99,53 %

2. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 Indikator : Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Layak Operasional
 Target : 100 %
 Realisasi : 98,3%
 Pencapaian : 99,15 %

Mendasar evaluasi dan analisis di atas, dalam upaya memenuhi urusan wajib yang harus ditangani Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, realisasi kinerja sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan yaitu capaian kinerja rata-rata 96,56%. Hal ini merupakan prestasi yang baik dan perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Evaluasi jumlah program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk tahun 2021 Dinas Perhubungan melaksanakan 2 Program dan 16 Kegiatan. Sedangkan tahun 2022 Dinas Perhubungan melaksanakan 1 Program, 11 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 terdapat permasalahan yaitu sulit dicapainya salah satu kurangnya pendaan . Hal ini disebabkan kurangnya anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2021 untuk pembangunan infrastruktur Perhubungan . Selain kurangnya anggaran, kebijakan pembangunan Traffic Light sangat tergantung pada skala prioritas PD, oleh karena itu hal ini menjadi evaluasi bagi Dinas Perhubungan dalam menentukan IKU pada RPJMD yang akan datang diharapkan

penetapan IKU Dinas lebih tepat sasaran pada kegiatan yang menjadi prioritas PD dan dilaksanakan rutin setiap tahun.

Hambatan lain yang sangat memiliki pengaruh besar dalam pencapaian IKU PD yaitu adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian anggaran yang semula dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dirasionalisasi atau dikurangi untuk dialihkan ke kegiatan dalam rangka penanggulangan Covid -19. Dampak yang dialami oleh Dinas Perhubungan akibat pandemi Covid-19 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya Rasionalisasi Anggaran yang semula diperuntukkan pembangunan infrastruktur dipangkas untuk mendanai penanganan Covid-19, sehingga anggaran APBD TA. 2021 yang semula sebesar Rp.15.484.604.431,50 berkurang menjadi Rp.13.605.346.920,60.
2. Akibat Pandemi Covid-19, semua kegiatan dilakukan dengan cara *teleconference* sehingga membatasi pengambilan keputusan terutama untuk hal – hal yang diperlukan tatap muka.

Sedangkan persentase realisasi anggaran dengan jumlah pagu yang dianggarkan secara umum sudah cukup baik, dijelaskan sebagai berikut :

- Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021
 Pada Tahun 2021 Jumlah Belanja Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi sebesar Rp.13.605.346.920,60.dengan rincian :
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 9.409.279.970,50
 - b. Belanja Langsung Rp. 4.196.066.950,00

Dalam rangka evaluasi RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten ngawi tahun 2021 dan telah terealisasi sebesar Rp.13.070.043.148,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96,56 % dan capaian fisik sebesar 94,87 %, dapat disajikan uraian hasil pengukuran kinerja yang mengarah pada kebijaksanaan program Dinas Perhubungan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan perhubungan, selanjutnya dapat diuraikan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
 (Tabel T-C29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017
 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan
 Pencapaian Renstra Dinas perhubungan S/d tahun 2021 (n-2/tahun berjalan)
 kabupaten Ngawi

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	BOBOT	TARGET KINERJA 1 TAHUN	KEUANGAN					FISIK			TOTAL KINERJA S/D BULAN DESEMBER	CAPAIAN	KENDALA
					T		R		K	T	R	K			
					Rp	%	Rp	%		%	%				
1	2	3	4	5=4*100	6	7=6/3*100	8	9=8/3*100	10=9*4*0,5	11	12	13=12*4*0,5	14=10+13	15=14/5*100	16
2.15.1	DINAS PERHUBUNGAN	15.956.285.013	0,0068	0,68	15.956.285.013	100	14.239.923.832	89,24	0,3016	100	98,5	0,33284	0,63444	93,86	
2.15 2.15.1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.898.095.013	0,8083	80,83	12.898.095.013	100	11.715.343.947	90,83	36,71074	100	100	40,41697	77,12771	95,41	
2.15 2.15.1 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.092.500	0,0031	0,31	40.092.500	100	40.092.400	100	0,15542	100	100	0,15542	0,31084	100	
2.15 2.15.1 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.092.500	0,7007	70,07	28.092.500	100	28.092.400	100	35,03461	100	100	35,03461	70,06922	100	
2.15 2.15.1 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000	0,2993	29,93	12.000.000	100	12.000.000	100	14,96539	100	100	14,96539	29,93078	100	
2.15 2.15.1 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.445.555.545	0,8874	88,74	11.445.555.545	100	10.314.187.262	90,12	39,9855	100	100	44,36917	84,35467	95,06	
2.15 2.15.1 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.416.651.545	0,9975	99,75	11.416.651.545	100	10.285.623.262	90,09	44,93125	100	100	49,87373	94,80498	95,05	

2.15 2.15.1 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.954.000	0,0009	0,09	9.954.000	100	9.690.000	97,35	0,04233	100	100	0,04348	0,08581	98,67	
2.15 2.15.1 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.950.000	0,0017	0,17	18.950.000	100	18.874.000	99,6	0,08245	100	100	0,08278	0,16523	99,8	
2.15 2.15.1 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	800.000	0,0001	0,01	800.000	100	616.896	77,11	0,00239	100	100	0,0031	0,00549	88,51	
2.15 2.15.1 1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	800.000	1	100	800.000	100	616.896	77,11	38,555	100	100	50	88,555	88,56	
2.15 2.15.1 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	6.998.000	0,0005	0,05	6.998.000	100	6.954.900	99,38	0,02696	100	100	0,02713	0,05409	99,69	
2.15 2.15.1 1.2.04.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	6.998.000	1	100	6.998.000	100	6.954.900	99,38	49,69	100	100	50	99,69	99,69	
2.15 2.15.1 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.350.000	0,0304	3,04	392.350.000	100	385.317.381	98,21	1,49374	100	100	1,52096	3,0147	99,11	
2.15 2.15.1 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.471.000	0,0394	3,94	15.471.000	100	15.452.000	99,88	1,96922	100	100	1,97158	3,9408	99,94	
2.15 2.15.1 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.060.000	0,1276	12,76	50.060.000	100	48.815.613	97,51	6,22066	100	100	6,37951	12,60017	98,76	
2.15 2.15.1 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.370.000	0,0392	3,92	15.370.000	100	15.352.000	99,88	1,95636	100	100	1,95871	3,91507	99,94	
2.15 2.15.1 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.799.000	0,6647	66,47	260.799.000	100	255.390.350	97,93	32,54753	100	100	33,2355	65,78303	98,96	

2.15 2.15.1 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.800.000	0,0326	3,26	12.800.000	100	12.774.000	99,8	1,62793	100	100	1,6312	3,25913	99,9	
2.15 2.15.1 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.850.000	0,0965	9,65	37.850.000	100	37.533.418	99,16	4,78298	100	100	4,8235	9,60648	99,58	
2.15 2.15.1 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.000.000	0,0015	0,15	19.000.000	100	18.551.500	97,64	0,07192	100	100	0,07365	0,14557	98,82	
2.15 2.15.1 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	1	100	19.000.000	100	18.551.500	97,64	48,82	100	100	50	98,82	98,82	
2.15 2.15.1 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.305.968	0,0575	5,75	741.305.968	100	703.475.039	94,9	2,72714	100	100	2,8737	5,60084	97,45	
2.15 2.15.1 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0	0	-	0	-	0		0	0	0		0	
2.15 2.15.1 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.565.968	0,5471	54,71	405.565.968	100	367.878.039	90,71	24,81357	100	100	27,35483	52,1684	95,36	
2.15 2.15.1 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.000.000	0,2846	28,46	211.000.000	100	210.987.000	99,99	14,23022	100	100	14,23164	28,46186	100	
2.15 2.15.1 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.740.000	0,1683	16,83	124.740.000	100	124.610.000	99,9	8,40512	100	100	8,41353	16,81865	99,95	
2.15 2.15.1 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.993.000	0,0195	1,95	251.993.000	100	246.148.569	97,68	0,9542	100	100	0,97686	1,93106	98,84	

2.15 2.15.1 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.011.000	0,0397	3,97	10.011.000	100	10.005.000	99,94	1,98517	100	100	1,98636	3,97153	99,97	
2.15 2.15.1 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.360.000	0,6999	69,99	176.360.000	100	172.444.869	97,78	34,21619	100	100	34,99304	69,20923	98,89	
2.15 2.15.1 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.622.000	0,062	6,2	15.622.000	100	15.565.000	99,64	3,08853	100	100	3,09969	6,18822	99,82	
2.15 2.15.1 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	0,1984	19,84	50.000.000	100	48.133.700	96,27	9,55086	100	100	9,92091	19,47177	98,13	
2.15 2.15.1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.058.190.000	0,1917	19,17	3.058.190.000	100	2.524.579.885	82,55	7,91079	100	95,8	9,18341	17,0942	89,19	
2.15 2.15.1 2.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	488.920.000	0,1599	15,99	488.920.000	100	136.350.210	27,89	2,22942	100	100	7,99362	10,22304	63,95	
2.15 2.15.1 2.2.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	488.920.000	1	100	488.920.000	100	136.350.210	27,89	13,945	100	100	50	63,945	63,94	
2.15 2.15.1 2.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	272.482.500	0,0891	8,91	272.482.500	100	266.806.300	97,92	4,3623	100	100	4,45496	8,81726	98,96	
2.15 2.15.1 2.2.03.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	183.826.500	0,6746	67,46	183.826.500	100	180.698.800	98,3	33,15836	100	100	33,7318	66,89016	99,15	

2.15 2.15.1 2.2.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	88.656.000	0,3254	32,54	88.656.000	100	86.107.500	97,13	15,8013	100	100	16,2682	32,0695	98,56
2.15 2.15.1 2.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.054.735.000	0,3449	34,49	1.054.735.000	100	1.043.664.400	98,95	17,06337	100	100	17,24443	34,3078	99,48
2.15 2.15.1 2.2.04.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.054.735.000	1	100	1.054.735.000	100	1.043.664.400	98,95	49,475	100	100	50	99,475	99,48
2.15 2.15.1 2.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	528.212.500	0,1727	17,27	528.212.500	100	511.760.331	96,89	8,36745	100	100	8,63603	17,00348	98,44
2.15 2.15.1 2.2.05.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	472.232.500	0,894	89,4	472.232.500	100	457.980.331	96,98	43,35103	100	100	44,701	88,05203	98,49
2.15 2.15.1 2.2.05.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.980.000	0,106	10,6	55.980.000	100	53.780.000	96,07	5,09075	100	100	5,299	10,38975	98,03
2.15 2.15.1 2.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	351.242.000	0,1149	11,49	351.242.000	100	347.727.237	99	5,68522	100	100	5,74265	11,42787	99,5
2.15 2.15.1 2.2.06.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	17.520.000	0,0499	4,99	17.520.000	100	16.653.000	95,05	2,37055	100	100	2,49401	4,86456	97,52
2.15 2.15.1 2.2.06.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	92.880.000	0,2644	26,44	92.880.000	100	90.956.000	97,93	12,94797	100	100	13,22165	26,16962	98,97

2.15 2.15.1 2.2.06.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	240.842.000	0,6857	68,57	240.842.000	100	240.118.237	99,7	34,18149	100	100	34,28434	68,46583	99,85	
2.15 2.15.1 2.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.913.000	0,087	8,7	265.913.000	100	127.442.407	47,93	2,08378	100	50	2,17378	4,25756	48,96	
2.15 2.15.1 2.2.09.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	265.913.000	1	100	265.913.000	100	127.442.407	47,93	23,965	100	50	25	48,965	48,96	
2.15 2.15.1 2.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	0,0294	2,94	90.000.000	100	84.649.000	94,05	1,38391	100	100	1,47146	2,85537	97,03	
2.15 2.15.1 2.2.11.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	1	100	90.000.000	100	84.649.000	94,05	47,025	100	100	50	97,025	97,02	
2.15 2.15.1 2.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.685.000	0,0022	0,22	6.685.000	100	6.180.000	92,45	0,10104	100	100	0,1093	0,21034	96,22	
2.15 2.15.1 2.2.12.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	6.685.000	1	100	6.685.000	100	6.180.000	92,45	46,225	100	100	50	96,225	96,22	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah SKPD

Peningkatan kualitas Perhubungan yang prima merupakan target program dari Perhubungan . Sasaran tersebut dapat dicapai melalui beberapa program kegiatan yang berkaitan dan saling mendukung. Kegiatan pelayanan Perhubungan yang prima sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangannya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut :

Kedudukan : Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas : Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Perhubungan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian tugas di bidang Perhubungan;
- e. monitoring dan evaluasi tugas di bidang Perhubungan;
- dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan :

Untuk melaksanakan fungsinya Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan:

- a. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. penyediaan perlengkapan jalan Daerah;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- d. penyelenggaraan, pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir dan halte;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- g. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- h. pengamanan, pengendalian dan penindakan ketertiban transportasi;
- i. pembinaan dan keselamatan transportasi;
- j. pengembangan teknologi bidang transportasi;
- k. rekomendasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
- l. audit dan inspeksi keselamatan transportasi;
- m. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- n. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan dalam Daerah;
- o. penetapan rencana umum jaringan trayek yang menghubungkan dalam Daerah;
- p. penetapan wilayah operasi dalam wilayah Daerah angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah;
- q. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan umum dalam Daerah;

- r. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- s. penetapan tarif untuk angkutan umum;
- t. rekomendasi izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;
- u. penentuan lokasi untuk pengendalian, pengawasan dan operasional lalu lintas; dan
- v. penyediaan penerangan jalan.

Struktur organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subagian Perencanaan
 - b. Subagian Umum
 - c. Subagian Keuangan
- 3. Bidang Lalu lintas, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengawasan Pengendalian Dan Operasional;
 - b. Seksi Perparkiran;
 - c. Seksi Teknik Lalu lintas.
- 4. Bidang Angkutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - b. Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan.
- 5. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan dan Pemukiman;
 - b. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan dan pemukiman;
- 6. Bidang Keselamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Rekayasa Keselamatan;
 - b. Seksi Pembinaan Keselamatan;

7. UPT Dinas :

- a. UPT Terminal;
- b. UPT Sub Terminal; dan
- c. UPT Sarana Parkir Kendaraan Berat.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organ sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Perhubungan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- d. pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian tugas di bidang Perhubungan;
- e. monitoring dan evaluasi tugas di bidang Perhubungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas

Perhubungan. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan;

- d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Subbagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Subbagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
- f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
- g. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

- h. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu Lintas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas. Untuk melaksanakan tugas Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan dan pengamanan lalu lintas;
- b. melaksanakan kebijakan teknis bidang lalu lintas yang mencakup penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi standar teknis di Bidang Lalu lintas;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- e. menyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana terminal
- f. menyelenggarakan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- g. menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan, pengelolaan terminal, sarana parkir kendaraan berat dan pos terpadu;
- h. menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan fasilitas parkir;

- i. melaksanakan kebijakan teknis bidang lalu lintas ;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lalu lintas;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Lalu Lintas membawahi tiga seksi yaitu Seksi Teknik Lalu Lintas, Seksi Perparkiran dan Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Seksi Teknik Lalu Lintas

Seksi Teknik Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Teknik Lalu Lintas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Teknik Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan peningkatan fasilitas teknik lalu lintas;
- b. menyusun perumusan kebijakan pembangunan dan pemeliharaan peningkatan teknik lalu lintas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan rekomendasi standar teknis pembangunan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan pemeliharaan peningkatan fasilitas teknik lalu lintas;
- e. menyelenggarakan, pembangunan dan pemeliharaan pengelolaan halte transportasi (Halte sungai, halte bus, trap penyeberangan);

- f. menyelenggarakan, pembangunan dan pemeliharaan pengelolaan terminal, sub terminal, sarana parkir kendaraan berat dan pos terpadu;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan seksi teknik lalu lintas;
- h. melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas Bidang Lalu Lintas.

2. Seksi Perparkiran

Seksi Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perparkiran yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Perparkiran mempunyai tugas:

- a. menyusun laporan dan mendata tentang fasilitas parkir ditepi jalan umum;
- b. melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung, memelihara dan mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi titik parkir ditepi jalan umum;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan penetapan titik parkir ditepi jalan umum;
- f. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi tentang perparkiran; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas Bidang Lalu Lintas.

3. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional

Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Operasional mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan dan pengamanan pengguna jalan, penyelenggaraan dan fasilitasi penghargaan wahana tata Nugraha, pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
- b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pengendalian operasional lalu lintas;
- c. menyiapkan bahan tata kelola keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas;
- d. melaksanakan pengamanan kegiatan protokoler Pejabat Negara dan/atau Pejabat Daerah;
- e. melaksanakan pengamanan dan penertiban lalu lintas pada peringatan hari besar Nasional maupun kegiatan tertentu;
- f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian operasional terminal angkutan orang dan barang;
- g. melaksanakan pengawasan, penertiban tentang persyaratan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
- h. melaksanakan penderekan dan pemberian sanksi terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas Bidang Lalu Lintas.

4. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Angkutan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Angkutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan pelayanan angkutan, program rehabilitasi pemeliharaan, dan pengadaan sarana prasarana angkutan;
- b. penyusunan norma, standar prosedur kriteria dan petunjuk teknis serta pembinaan di bidang angkutan;
- c. penyiapan bahan rekomendasi penetapan kawasan dan rencana umum jaringan trayek dalam Daerah;
- d. penyiapan bahan rekomendasi penetapan kebijakan tarif angkutan umum dalam Daerah;
- e. fasilitasi rekomendasi pelayanan perijinan tertentu dan angkutan;
- f. perencanaan/pembangunan/pengadaan/peningkatan/pengembangan/ pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Angkutan membawahi dua seksi yaitu Seksi Angkutan Orang dan Barang, dan Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Seksi Angkutan Orang dan Barang

Seksi Angkutan Orang dan Barang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Angkutan Orang dan Barang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan angkutan umum, dan kegiatan koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
- b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan manajemen angkutan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional dan analisis kinerja angkutan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan perijinan angkutan orang dan barang;
- e. menyiapkan bahan rencana penetapan tarif penumpang angkutan umum dalam Daerah;
- f. fasilitasi pelaksanaan angkutan umum murah dan/atau gratis untuk anak sekolah dan masyarakat;
- g. menyusun bahan pengawasan dan pembinaan angkutan orang dan barang;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi angkutan orang dan barang; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas Bidang Angkutan.

2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan

Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan. Seksi Sistem Informasi Manajemen Angkutan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pelayanan angkutan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penelitian, perencanaan dan pengembangan teknologi angkutan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar prosedur pengelolaan teknis Angkutan;
- d. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pelayanan perijinan dan pengujian kendaraan bermotor;
- e. melaksanakan administrasi pengembangan teknologi dan transportasi;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas Bidang Angkutan.

5. Bidang Teknik Sarana Prasarana

Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- b. penyiapan rencana dan bahan bimbingan pengelolaan penerangan jalan dan permukiman;
- c. penyusunan kebijakan teknis bidang teknis di Bidang

Teknik Sarana dan Prasarana;

- d. perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
- f. pemberian rekomendasi pembangunan penerangan jalan yang pembangunannya dibiayai oleh masyarakat;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- a. penginventarisasian keadaan penerangan jalan dan fasilitas lain yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; dan
- b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Teknik Sarana Prasarana membawahi dua seksi yaitu Seksi Pembangunan Penerangan Jalan dan Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan

Seksi Pembangunan Penerangan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan Penerangan Jalan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan mempunyai tugas:

- a. menyusun laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan penerangan jalan umum;
- b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan pembangunan penerangan jalan umum;
- c. memberikan rekomendasi pembangunan penerangan jalan;
- d. menyiapkan bahan pemutakhiran program-program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan penerangan jalan dan permukiman;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian

pembangunan penerangan jalan;

- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan penerangan jalan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan Seksi Pembangunan Penerangan Jalan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas Bidang Angkutan.

2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan

Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan kegiatan pemeliharaan penerangan jalan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana pemeliharaan penerangan jalan;
- c. melaksanakan pemeliharaan penerangan jalan;
- d. melakukan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas Bidang Teknik Sarana dan Prasarana.

6. Bidang Keselamatan

Bidang Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Keselamatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di

Bidang Keselamatan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. menyusun bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pemeliharaan marka jalan;
- b. penyusunan kebijakan teknis Bidang Keselamatan;
- c. Perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Bidang Keselamatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di Bidang Keselamatan;
- e. melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan informasi teknologi terkait;
- f. melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan;
- g. memberikan bahan pertimbangan izin rekomendasi tentang analisis dampak lalu lintas;
- h. memberikan bahan pertimbangan rekomendasi izin penutupan sebagian badan jalan;
- i. memberikan bahan pertimbangan ijin rekomendasi tentang analisa dampak lalu lintas;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Keselamatan membawahi dua seksi yaitu Seksi Rekayasa Keselamatan dan Seksi Pembinaan Keselamatan dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Seksi Rekayasa Keselamatan

Seksi Rekayasa Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekayasa yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan. Seksi Rekayasa keselamatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan memadukan rencana rekayasa keselamatan;
- c. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan / perlengkapan jalan;
- d. melaksanakan inventarisasi perlengkapan jalan;
- e. melaksanakan pengadaan, pembangunan fasilitas keselamatan / perlengkapan jalan (rambu-rambu lalu lintas, teknologi lalu lintas, atcs);
- f. melakukan inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Rekayasa keselamatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan;

2. Seksi Pembinaan Keselamatan

Seksi Pembinaan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Bidang Keselamatan . Seksi Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan keselamatan;
- b. mengumpulkan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, criteria dan pertimbangan pembinaan keselamatan;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan keselamatan transportasi;
- d. menyelenggarakan pembinaan deteksi dan cegah dini penyuluhan keselamatan transportasi;

- e. menyelenggarakan fasilitasi keselamatan transportasi;
- f. menyelenggarakan promosi dan kemitraan keselamatan transportasi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan.

7. UPT Dinas

UPT Dinas terdiri dari : UPT Terminal (Terminal Gendingan, Terminal Ngrambe dan Terminal Karangjati). UPT Sub Terminal Geneng dan UPT Sarana Parkir Kendaraan Berat. UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPT Dinas sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Untuk melaksanakan tugas UPT Dinas mempunyai fungsi layanan:

- a. Menyusun program perencanaan retribusi terminal dan kegiatan di UPT Terminal, Sub Terminal dan UPT Sarana Parkir Kendaraan Berat;
- b. Menyusun kebutuhan laporan karcis retribusi terminal, Sub Terminal, parkir ditepi jalan umum (Kendaraan berplat Nomor diluar AE Ngawi) dan retribusi tempat parkir kendaraan;
- c. Menyusun standar operasional dan prosedur tentang petunjuk teknis pelaksanaan di terminal, Sub terminal, UPT

Sarana Parkir kendaraan berat dan parkir ditepi jalan umum (kendaraan berplat nomor diluar AE Ngawi);

- d. Melaksanakan penarikan retribusi di terminal (terminal gendingan, terminal Karangjati dan terminal Ngrambe, Sub Terminal Geneng, UPT Sarana Parkir Kendaraan Berat dan retribusi Parkir ditepi jalan umum (kendaraan yang berplat Nomor diluar AE Ngawi);
- e. Melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan bidang Perhubungan;
- f. Memberikan layanan rekomendasi ijin masuk kota di Sarana parkir kendaraan berat atau dipos yang telah disediakan;
- g. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di UPT Terminal, Sub Terminal, UPT Sarana Parkir Kendaraan Berat dan parkir ditepi jalan umum (kendaraan berplat Nomor diluar AE Ngawi);
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di UPT Terminal, Sub Terminal dan UPT Sarana Parkir Kendaraan Berat;
- i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di UPT Terminal, Sub Terminal dan UPT Sarana Parkir Kendaraan Berat dan parkir ditepi jalan umum (kendaraan berplat Nomor diluar AE Ngawi).

8. Kelompok Jabatan Fungsional

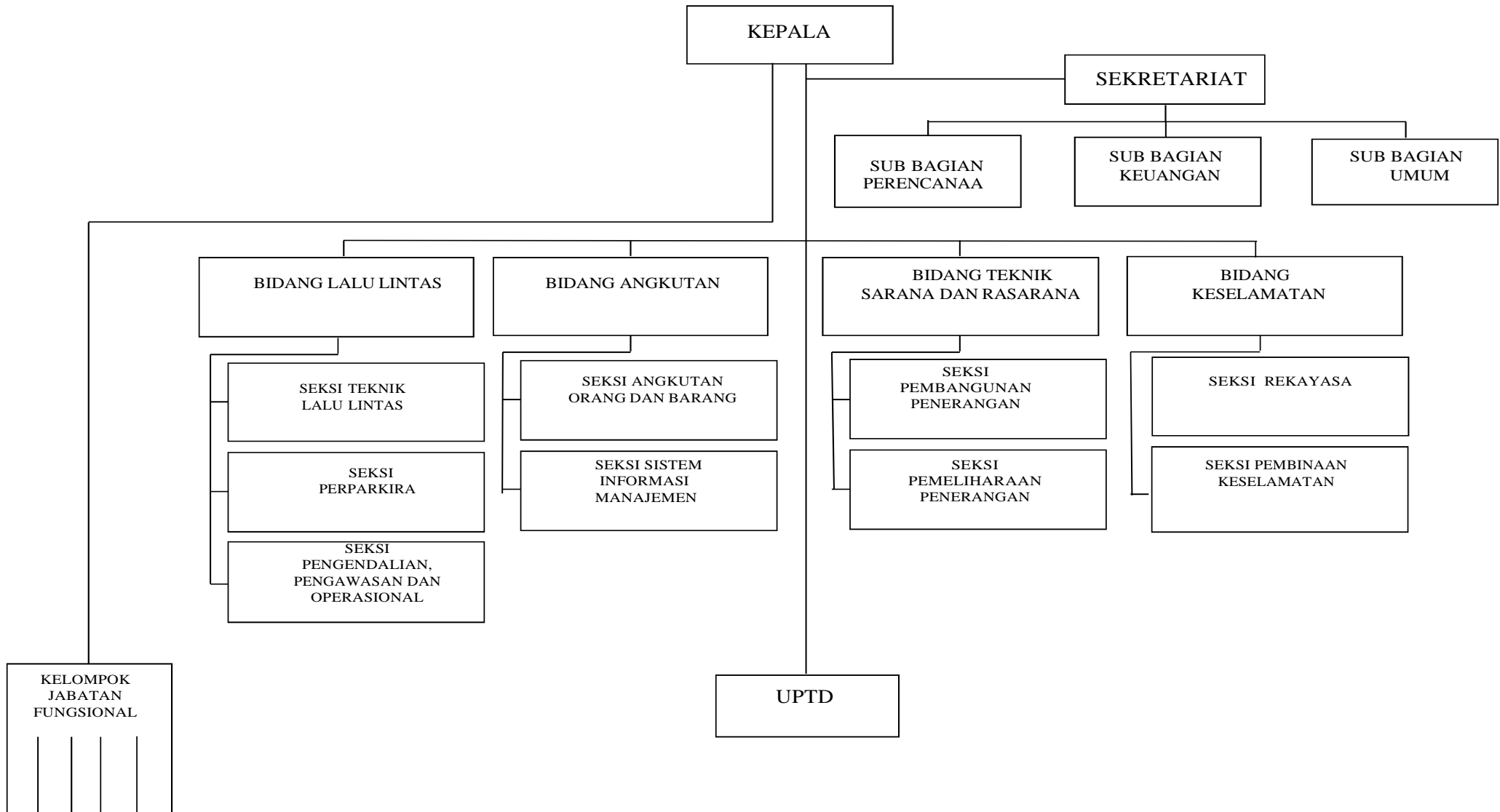
1. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), terdiri dari:

- a. Penguji Kendaraan Bermotor Ahli Muda;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
4. Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
 6. Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 7. Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
 8. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
 9. Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN TIPE A



Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana sebelumnya lembaga ini bernama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Mendasar pada peraturan tersebut serta Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan, maka sebagai bentuk implementasi serta amanat dari peraturan tersebut di atas disusunlah dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJM. Dimana Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
2. Rencana Kerja (RENJA - PD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD,

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Ngawi, dengan susunan organisasi seperti yang disajikan pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Sedangkan keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 2.2 (Tabel.T-C.30) :

Tabel 2.2
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Ngawi

No	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IKU Tahun 2021-2026												
1	Rasio sarana Prasarana Perhubungan yang Ada dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan prasarana Perhubungan dengan Kondisi Baik Di Bagi Jumlah keseluruhan Sarana Prasarana		9:8		-	-	9:9	-	-	-	
2	Posentase Kecamatan yang terlayani Angkutan Umum	Jumlah Kecamatan yang terlayani Angkutan Umum di bagi Jumlah Keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Ngawi X 100%		99 %		-	-	100 %	-	-	-	
3	Angka Kecelakaan lalulintas	Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun N-1 Di Kurangi Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun N		500		-	-	500	-	-	-	

IKU Tahun 2022												
No	Indikator	SPM/ standar	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
		Nasional		Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IKU Tahun 2022												
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai pada Tahun N		86.90%	89.95%	87.00%	87.05 %	86.90%	-	-	-	
2	Rasio kecelakaan lalulintas terhadap jumlah kendaraan	Kecelakaan laulintas Tahun N : Jumlah kendaraan Tahun N		495	936:396.4 23	971:422. 688	1007:48 8.953	495	-	-	-	

Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi mengalami perubahan IKU .dari yang semula tahun 2016 s.d 2021 penghitungan IKU hanya menghitung jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas tanpa membandingkan dengan jumlah kendaraan yang ada.untuk IKU tahun 2022 penghitunganya Rasio kecelakaan lalulintas terhadap jumlah kendaraan adalah Kecelakaan laulintas Tahun N : Jumlah kendaraan Tahun N, sumber data Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi Dan Dispenda Propinsi Jawa Timur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks. Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan supply dan demand, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan. Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi massal, konversi bahan bakar fosil ke gas dan intelegensia transport management. Dalam hal manufaktur, pada level nasional, isu yang terus didiskusikan adalah sejauh mana industri manufaktur nasional bisa memproduksi mesin-mesin yang berstandar euro-2 dengan tingkat emisi yang relatif rendah yang terkait dengan keinginan dan rencana Pemerintah Indonesia menurunkan tingkat emisi sebesar 26% atau setara dengan 2,9 metrik kubik karbon. Di Eropa, standar mesin-mesin yang digunakan untuk sarana transportasi sudah berstandar.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat ini masih aktual adalah :

1. Berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan serta Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan harus disesuaikan dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.
2. Kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan optimal;
3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tahun 2018 harus telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 baik dari sisi urusan, organisasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas

Perhubungan dan penganggarannya, namun sampai dengan akhir Tahun 2022 penyerahan P3D sesuai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum selesai dengan tuntas;

4. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke seamless transport.
5. Perlunya penataan transportasi perkotaan yang memiliki kondisi lingkungan udara sehat, peningkatan daya saing serta mendorong investasi dan pertumbuhan.
6. Rendahnya penggunaan angkutan umum yang diindikasikan dengan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi
7. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transportasi.
8. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan transportasi massal berbasis jalan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang.

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan, secara umum bidang transportasi yang terdiri dari transportasi darat, dihadapkan pada permasalahan berupa rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa :

1. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
2. Masih terbatasnya ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai;
3. Belum optimalnya proses pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
4. Kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan rel;
5. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
6. Komoditas ekspor dan import dari dan ke kabupaten ngawi masih dilakukan melalui transportasi darat , yang saat ini mengalami keterbatasan kapasitas dan aksesibilitas, sehingga diperlukan pembangunan jalan alternatif yang

lainnya untuk mendukung pergerakan orang dan barang di wilayah kabupaten ngawi ;

Pada Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kab Ngawi telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan bidang perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021– 2026, dalam hal ini Dinas Perhubungan mengawal Misi ke 4 kepala daerah “ Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan”. Sedangkan penanganan tugas pokok sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan lainnya belum maksimal dilaksanakan, mengingat penanganan bidang perhubungan memerlukan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta semua stakeholder. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pada tahun tahun mendatang Dinas Perhubungan mampu melaksanakan seluruh kewenangan pemerintah Kabupaten dibidang perhubungan dan menjadikan dinas yang dapat mendukung dalam kerangka pembangunan daerah kabupaten ngawi khususnya pembangunan di sektor perhubungan.

Dari uraian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut di atas diperlukan upaya dan strategi secara bersama untuk meningkatkan pelayanan bidang Perhubungan. Dengan adanya kendala tersebut, maka strategi yang diterapkan dalam upaya pemecahannya adalah dengan menggunakan strategi skala prioritas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan bahwa tujuan pencapaian visi Dinas Perhubungan sebagai sasaran utama masih tetap dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. sehingga apa yang mau diselesaikan dan dituntaskan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan apa dan sesuai ketersediaan alokasi anggaran, maka difokuskan pada program tersebut. Selain itu diperlukan strategi terobosan yang terencana dan bertahap agar tujuan akhir dari pelayanan bidang Perhubungan berupa penyelenggaraan

perhubungan yang mengembangkan sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perhubungan barang dan jasa yang dinamis, guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diwujudkan. Perencanaan yang Sinergis dengan seluruh stake holder atau Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta semua stakeholder, merupakan salah strategi yang dapat di jalan. Dengan berbagi peran antara antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta semua stakeholder dan pendanaan yang multi pihak, program prioritas yang diharapkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat segera diselesaikan. Bila diperlukan dapat melibatkan BUMN, BUMD, dan masyarakat dunia usaha dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengidentifikasi masalah sangat diperlukan dalam rangka penyusunan Renja Dishub Kabupaten Ngawi Tahun 2023. Untuk mendukung hal tersebut maka digunakan Metode Analisis *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats (SWOT)*, serta adanya faktor penentu keberhasilan (*Critical Succes Factor/ CSF*).

Metode Analisis SWOT memerlukan adanya masukan berupa Faktor Lingkungan Internal dan Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat subyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan analisis yang tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota kelompok analisis.

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan, sebagai berikut:

a. Kekuatan

- 1) Tersedianya jumlah pegawai yang cukup

- 2) Tersedianya regulasi bidang perhubungan
 - 3) Tersedianya sarana prasarana yang memadai
 - 4) Komunikasi dan interaksi atasan-bawahan yang sinergis
 - 5) Tersedianya data bidang perhubungan
- b. Kelemahan
- 1) Kurang tertibnya pengelolaan administrasi anggaran
 - 2) Kurang optimalnya pengelolaan sarana prasarana
 - 3) Belum adanya sistem punish and reward dalam hal penilaian hasil kinerja staf

2. Faktor Lingkungan Eksternal

- a. Peluang
- 1) Otonomi Daerah
 - 2) Fungsi dan kedudukan Dishub
 - 3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 4) Kebijakan pusat dan daerah
 - 5) Terciptanya forum koordinasi dan komunikasi
- b. Ancaman/Tantangan
- 1) Globalisasi
 - 2) Spill over of information atau Peluberan arus informasi
 - 3) Aturan yang kurang sesuai dengan kondisi daerah
 - 4) Mutasi pegawai
 - 5) Investasi yang mengabaikan kearifan lokal

Dari sejumlah pilihan, ditentukan Faktor Penentu Keberhasilan (*Critical Success Factors*), yaitu:

1. Dukungan sumberdaya yang memadai.
2. Komunikasi / interaksi atasan dan bawahan, serta kerjasama antar bidang dan personil yang sinergis.
3. Kerjasama antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, LSM dan masyarakat.
4. Mantapnya penataan kelembagaan Dishub dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi

Selain faktor-faktor penentu keberhasilan, perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan, yaitu:

1. Ancaman stabilitas pada bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan keamanan, yang mengakibatkan kurang satabilnya pemerintah daerah.
2. Aturan/Kebijakan Pusat dan Daerah yang kurang sinkron.

Terkait dengan rekomendasi/catatan untuk di tindaklanjuti tahun berikutnya, mendasar Renstra, RKPD akhirnya Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi mengambil kebijakan melaksanakan 1 program, 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan.

Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD diperlukan:

1. Penambahan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mengakomodir rencana kerja yang akan diselenggarakan pada tahun rencana
2. Perbaiki indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
3. Penambahan pagu kegiatan PD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

4. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi dalam rangka mendukung Visi Misi Kabupaten Ngawi perlu adanya dukungan penambahan anggaran agar pelaksanaan program kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi bisa dilaksanakan secara maksimal.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD 2023 dengan usulan RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi diuraikan pada tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Ngawi

Nama PD: Dinas Perhubungan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				38.067.718.246	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				38.067.718.246	
2.15.01	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	14.430.225.446	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%	14.430.225.446	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu		41.351.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu		41.351.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	11 Dokumen	12.875.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	11 Dokumen	12.875.000	
2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dishub	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	11 Dokumen	3.960.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dishub	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	11 Dokumen	3.960.000	

2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dishub	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	11 Dokumen	3.710.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dishub	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	11 Dokumen	3.710.000	
2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dishub	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA SKPD	11 Dokumen	9.080.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Dishub	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA SKPD	11 Dokumen	9.080.000	
2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dishub	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	11 Dokumen	6.018.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Dishub	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	11 Dokumen	6.018.000	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah		5.708.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dishub	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah		5.708.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		13.161.862.169	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		13.161.862.169	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	13.121.391.669	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dishub	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Kali	13.121.391.669	

2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dishub	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		21.478.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dishub	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD		21.478.000	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dishub	Jumlah Laporan keuangan /Triwulan /semesteran SKPD dan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan /semesteran SKPD		18.992.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dishub	Jumlah Laporan keuangan /Triwulan /semesteran SKPD dan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan /semesteran SKPD		18.992.500	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah yang difasilitasi dalam setahun		800.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah yang difasilitasi dalam setahun		800.000	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dishub	Jumlah dokumen pengamanan barang milik Daerah		800.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dishub	Jumlah dokumen pengamanan barang milik Daerah		800.000	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target tahun berkenaan		19.660.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target tahun berkenaan		19.660.000	
2.15.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Restribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah	Dishub	Jumlah Dokumen hasil analisis serta pengembangan Restribusi Daerah dan Kebijakan		19.660.000	Analisa dan Pengembangan Restribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Restribusi Daerah	Dishub	Jumlah Dokumen hasil analisis serta pengembangan Restribusi Daerah dan Kebijakan Restribusi Daerah		19.660.000	

			Restribusi Daerah							
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		492.032.361	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun		492.032.361
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Kantor yang disediakan		20.967.161	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dishub	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		20.967.161
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		60.525.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		60.525.000
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		6.504.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dishub	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		6.504.000
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishub	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		262.738.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dishub	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		262.738.200
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan		14.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dishub	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan		14.400.000
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dishub	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Tamu		10.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dishub	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan Tamu		10.400.000

2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishu b	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		116.498.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dishub	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		116.498.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun		25.929.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun		25.929.000	-
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishu b	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		25.929.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		25.929.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		503.506.916	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun		503.506.916	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishu b	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air, dan listrik yang disediakan		137.396.916	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dishub	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air, dan listrik yang disediakan		137.396.916	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishu b	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		172.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dishub	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		172.800.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dishu b	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		193.310.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dishub	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		193.310.000	

2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun		185.084.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun		185.084.000	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishu b	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		42.160.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dishub	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		42.160.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishu b	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknta dan perizinannya		93.280.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dishub	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknta dan perizinannya		93.280.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishu b	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		49.644.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dishub	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		49.644.000	
2,15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Prosentase Kecelakaan Lalu lintas	0,0024%	23.637.492.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Prosentase Kecelakaan Lalu lintas	0,0024%	23.637.492.800	
2.15.02.2,01	Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ kabupaten/ Kota		Prosentase infrastruktur perlengkapan jalan yang dipelihara		116.702.000	Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ kabupaten/ Kota		Prosentase infrastruktur perlengkapan jalan yang dipelihara		116.702.000	

2.15.02.2,01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	Dishu b	Jumlah laporan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Kota		116.702.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	Dishub	Jumlah laporan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Kota		116.702.000	
2.15.02.2,02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase sarana lalulintas dalam kondisi baik		18.100.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Prosentase sarana lalulintas dalam kondisi baik		18.100.000.000	
2.15.02.2,02.01	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Dishu b	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten /kota yang tersedia		2.385.000.000	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Dishub	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten /kota yang tersedia		2.385.000.000	
2.15.02.2,02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishu b	Junlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia		20.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Junlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia		20.000.000	
2.15.02.2,02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dishu b	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		15.695.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dishub	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		15.695.000.000	
2.15.02.2,03	Pengelolaan Terminal penumpang Tipe C		Prosentase sarana dan prasarana terminal dalam kondisi baik		1.190.456.000	Pengelolaan Terminal penumpang Tipe C		Prosentase sarana dan prasarana terminal dalam kondisi baik		1.190.456.000	
2.15.02.2,03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dishu b	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan		422.866.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan		422.866.000	
2.15.02.2,03.04	Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan pendukung)	Dishu b	Jumlah terminal (Fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara		194.400.000	Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan pendukung)	Dishub	Jumlah terminal (Fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara		194.400.000	

2.15.02.2,03.05	Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Terminal tipe C	Dishub	Jumlah SDM pengelola Terminal Type C yang ditingkatkan kapasitasnya		194.400.000	Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Terminal tipe C	Dishub	Jumlah SDM pengelola Terminal Type C yang ditingkatkan kapasitasnya		194.400.000	
2.15.02.2,04	Penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Prosentase pengelolaan parkir yang baik		1.484.452.000	Penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Prosentase pengelolaan parkir yang baik		1.484.452.000	
2.15.02.2,04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten /Kota		1.484.452.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten /Kota		1.484.452.000	
2.15.02.2,05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		persentase kendaraan laik jalan di jalan raya		704.135.800	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		persentase kendaraan laik jalan di jalan raya		704.135.800	
2.15.02.2,05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia		681.635.800	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia		681.635.800	
2.15.02.2,05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	1 Paket	22.500.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dishub	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	1 Paket	22.500.000	

2.15.02.2,06	Pelaksanaan menjemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota		Jumlah infrastruktur pelengkapan jalan		1.090.000.000	Pelaksanaan menjemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota		Jumlah infrastruktur pelengkapan jalan		1.090.000.000	
2.15.02.2,06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dishub	Jumlah pengadaan , pemasangan , perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka menajemen dan rekayasa Lalulintas		951.924.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dishub	Jumlah pengadaan , pemasangan , perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka menajemen dan rekayasa Lalulintas		951.924.000	
2.15.02.2,06.03	Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen pelaksanaan Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/Kota		119.500.000	Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen pelaksanaan Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/Kota		119.500.000	
2.15.02.2,06.05	Forum Lalulintas dan angkutan jalan Kabupaten /Kota	Dishub	Jumlah laporan forum Lalulintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota		18.576.000	Forum Lalulintas dan angkutan jalan Kabupaten /Kota	Dishub	Jumlah laporan forum Lalulintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota		18.576.000	
2.15.02.2,07	Persetujuan Hasil analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen andalalin yang dibuat		50.000.000	Persetujuan Hasil analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten /Kota		Jumlah Dokumen andalalin yang dibuat		50.000.000	
2.15.02.2,08.01	Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian hasil Andalalin	Dishub	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian Hasil Andalalin		50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian hasil Andalalin	Dishub	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian Hasil Andalalin		50.000.000	

2.15.02.2,08	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan		Jumlah pengawasan yang dilaksanakan		604.033.000	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan		Jumlah pengawasan yang dilaksanakan		604.033.000
2.15.02.2,08.04	Pelaksanaan inspeksi ,audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Dishu b	Jumlah laporan inspeksi audit dan pemantauan Pemenuhan Persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota		604.033.000	Pelaksanaan inspeksi ,audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Dishub	Jumlah laporan inspeksi audit dan pemantauan Pemenuhan Persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota		604.033.000
2.15.02.2,09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase pelayanan angkutan orang dan barang		92.035.500	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase pelayanan angkutan orang dan barang		92.035.500
2.15.02.2,09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishu b	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang anat kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang tersedia		92.035.500	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang anat kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang tersedia		92.035.500
2.15.02.2,11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase angkutan umum dalam kota yang berkualitas baik		170.735.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase angkutan umum dalam kota yang berkualitas baik		170.735.000

2.15.02.2,11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		170.735.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dishub	Jumlah Dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		170.735.000	
2.15.02.2,12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase angkutan umum pedesaan yang berkualitas baik		34.943.500	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase angkutan umum pedesaan yang berkualitas baik		34.943.500	
2.15.02.2,12.02	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan Rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota	Dishub	Jumlah Dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan Trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	1 Kali	34.943.500	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan Rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota	Dishub	Jumlah Dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan Trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota	1 Kali	34.943.500	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan. sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD; dan;
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran indikator kinerja Program/kegiatan (output)	Target	Lokasi
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang sesuai standard keselamatan lalulintas		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase ruas jalan yang PJUnya dalam kondisi baik		

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		
	- Pembangunan PJU	6 titik	Ds. Rejomulyo, Kecamatan Karangjati
		15 titik	Desa Tulakan, Kecamatan Sine
		10 titik	Jln. Poros Desa Jatirejo, Kecamatan Kasreman
		15 titik	Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan
		12 titik	Jembatan Pandean, Kec. Mantingan
		15 titik	Ds. Sekaralas Kec. Widodaren
		16 titik	Dsn Bulakpande, Dsn Pojok, Dsn Kayutreja, Dsn Tanjungreja, Kayutreja, Kec.Widodaren
		10 titik	RT 01 - RT 03 Dsn. Ngrendeng.Ds. Ngrendeng (Jln. Ngrendeng - Jamus Ds. Ngrendeng), Ngrendeng, Kec.Sine
		10 titik	Hargosari, Hargosari, Kec.Sine
		15 titik	Desa Sine, Kec.Sine
		10 titik	Ds Sekarputi, Kec.Widodaren
		10 titik	Dsn. Plelek, pengkol, kedunglengki, Kec.Mantingan
		15 titik	Desa Widodaren, Kec.Gerih

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Permasalahan dan dimensi pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selalu berubah dan makin kompleks. Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah bersikap realistis, dengan tidak membuat sasaran-sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Ngawi dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan disusun berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Ngawi 2021-2026, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan nasional.

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini diarahkan guna memantapkan

pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, pencapaian visi dan misi Bupati Ngawi seperti yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025, sehingga diharapkan ada kesinambungan dan sinkronisasi program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan lembaga daerah yang melaksanakan program perencanaan, pembangunan daerah, serta tata kota sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditentukan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pembangunan infrastruktur daerah serta dituntut untuk menghasilkan terobosan terobosan yang berkualitas terutama terobosan berupa pengadaan Traffic Light serta perawatannya, rehabilitasi pengujian Kendaraan Bermotor dikabupaten. Untuk itu, disusun Visi dan Misi Dinas Perhubungan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Tahun 2021-2026.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi adalah :

“Terwujudnya Transportasi Yang Handal, Aman dan Nyaman ”

Visi tersebut di atas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi sekaligus peran PD sebagai suatu lembaga teknis pembangunan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang memadai guna mengupayakan dan mewujudkan lingkungan yang nyaman dan berwawasan lingkungan tahun 2023.

Setiap organisasi harus memastikan agar misi masa depan senantiasa sesuai dan selaras dengan perubahan yang terjadi, sehingga dengan demikian organisasi akan berjalan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan visinya.

Visi dan misi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh unsur yang ada pada organisasi, sehingga kedua ungkapan Visi dan Misi tersebut harus sesuai dengan tugas yang diembannya. Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan maka dirumuskan misi Dinas Perhubungan mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan.

Adapun kebijakan Transportasi darat dalam otonomi daerah adalah :

1. Mendorong daerah untuk menyusun perencanaan transportasi daerah yang sinergis dengan rencana transportasi nasional.
2. Penyesuaian rencana transportasi nasional dengan kebijakan perencanaan transportasi di daerah.
3. Menjadi pedoman bagi perencanaan transportasi daerah.
4. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya forum kerjasama antar daerah dalam rangka perencanaan transportasi nasional.
5. Peningkatkan sumber daya manusia sesuai kualifikasi dan kompetensi.

Adapun kesesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional di bidang perhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi .

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA-PD) SKPD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah dimana RKPD tersebut merupakan landasan dan pedoman untuk penyusunan APBD Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 merupakan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2023 menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi pada Tahun 2023. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai pada Tahun 2023 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan.

Tujuan dan sasaran merupakan gambaran agenda pembangunan dalam rangka mewujudkan dan menjalankan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal – hal yang dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi adalah “Menghasilkan rumusan kebijakan teknis dan mewujudkan pelayanan prima bidang perhubungan yang mampu mendukung pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Terwujudnya

pelayanan bidang perhubungan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat ”.

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Perhubungan. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Perhubungan yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, rumusan Misi Dinas Perhubungan kabupaten Ngawi yang diprioritaskan sebagai berikut :

- Misi 1 : Menciptakan sistem transportasi yang efektif dan efisien serta terjangkau masyarakat.
- Misi 2 : Menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan aman
- Misi 3 : Meningkatkan sarana prasarana Perhubungan
- Misi 4 : Menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok sadar keselamatan transportasi.
- Misi 5 : Menciptakan dan mengembangkan aparatur Perhubungan yang berkualitas

Misi - misi tersebut di atas bertujuan untuk_Menghasilkan rumusan kebijakan teknis dan mewujudkan pelayanan prima bidang perhubungan yang mampu mendukung pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya pelayanan bidang perhubungan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Tindakan nyata yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan merata.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan dan profesionalisme sumber daya manusia bidang perencanaan serta pembangunan Traffic Light serta rehabilitasi Pengujian.
3. Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan yang telah direncanakan secara berkualitas sehingga tercapai target kinerja yang diinginkan.

Secara garis besar pemenuhan target pencapaian indikator kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi rata-rata telah memenuhi/sesuai dengan target yang direncanakan 5 tahun yang lalu. Kegiatan yang persentase pencapaiannya kurang dari 100% yaitu pada indikator prosentase rambu rambu Lalulintas dalam kondisi baik dan indikator Pengadaan dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor alam yaitu bencana alam dan curah hujan yang tinggi. Faktor alam yaitu diantaranya curah hujan yang tinggi mengakibatkan kondisi rambu rambu Lalulintas menjadi rusak dan berkarat
2. Faktor anggaran, penetapan pagu anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran terkadang kurang dari yang telah direncanakan, sehingga pemenuhan volume yang telah direncanakan tidak sesuai dengan target yang diinginkan.
3. Adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat besar dalam mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan. Dampak yang dialami oleh Dinas Perhubungan akibat pandemi Covid-19 antara lain Rasionalisasi Anggaran yang semula diperuntukkan pembangunan infrastruktur dipangkas untuk mendanai penanganan Covid-19, sehingga anggaran APBD TA. 2021 yang semula sebesar Rp. 15.484.804.431,50 berkurang menjadi Rp. 13.605.346.920.60 Selain itu Akibat Pandemi Covid-19, Sebagian besar kegiatan ataupun koordinasi dilakukan dengan cara daring melalui *teleconference*

sehingga membatasi pengambilan keputusan terutama untuk hal – hal yang diperlukan tatap muka.

Peluang yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut diantaranya :

- Diadakannya Kegiatan Pemeliharaan Rambu rambu Lalulintas dengan cara memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada secara maksimal.
- Menggunakan dana yang bersumber dari pusat, DAK, maupun dana dari sumber pendanaan lainnya lainnya semaksimal mungkin.

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Bupati Ngawi Periode 2021 -2026 yaitu “terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dalam semangat gotong royong dalam bingkai NKRI” maka disusunlah 5 (Lima) Misi yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari pelaksanaan Program Kinerja Bupati untuk Lima Tahun kedepan, salah satu misi yang pencapaiannya melekat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi yaitu tersirat pada misi yang ke empat, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel. 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan

Visi	: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI		
Misi 4	: Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar	<p>Nilai LHE AKIP,Indek pengelolaan keuangan Daerah, Maaturitas SPIP, Indek profesionalitas ASN, indek SPBE.</p> <p>Indek pembangunan infrastruktur, Persentasi pemukiman yang sehat dan aman, indek resiko bencana.</p>	Kepuasan Layanan Infrastruktur
--	--	--	--------------------------------

Tujuan dan sasaran pada Renja Perangkat Daerah akan memberikan arahan pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayan dasar; urusan pilihan; dan fungsi penunjang urusan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) SKPD dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian misi kepala daerah. Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat *outcome* dan atau *impact*, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih sesuai untuk pencapaian misi kepada daerah yang nantinya diperlukan untuk menjaga kesinambungan dalam peningkatan pembangunan kualitas infrastruktur sesuai dengan daya dukung lingkungan dan fungsi ruang yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju terwujudnya Ngawi lebih baik dan lebih sejahtera.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan yang dicanangkan pada tahun 2023 adalah sebagian dari program dan kegiatan 5 tahun kedepan sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026, sebagai cara pencapain tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Tabel 3,3
 (Tabel T-c.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
 Rumusan Rencana Program /Kegiatan /Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2023
 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
 Kabupaten Ngawi

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						47,427,318,601			
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14,665,751,245			
2	15	1	2:01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130,000,000		
2	15	1	2:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang Disusun	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	4 Dokumen	12.875.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100,000,000
2	15	1	2:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	6 Laporan	3.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	30,000,000

2	15	1	2:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	6 Laporan	3.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	30,000,000	
2	15	1	2:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	6 Laporan	9.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	30,000,000	
2	15	1	2:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	6 Laporan	6.018.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	30,000,000	
2	15	1	2:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	4	5.708.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	30,000,000	
2	15	1	2:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.161.862.169				14,619,530,527
2	15	1	2:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	26 dokumen	13.121.391.669	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	14,549,530,527	

2	15	1	2:02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	1 dokumen	21.478.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	20,000,000	
2	15	1	2:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan /Triwulan /semesteran SKPD dan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	48 Dokumen	18.992.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	50,000,000	
2	15	1	2:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				800.000				800
2	15	1	2:03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pembayaran PBB	Kab. Ngawi, Widodaren, Gendingan	1 Kali	800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	800	
2	15	1	2:04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				19,660,000				30,000,000
2	15	1	2:04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis serta pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Restribusi	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	19.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	30,000,000	
2	15	1	2:05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0				351,000,000
2	15	1	2:05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah atribut pakaian yang dibeli / diadakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Grudo	140 buah	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	251,000,000	

2	15	1	2:05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	20 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	20,000,000	
2	15	1	2:05	#	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	25 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	30,000,000	
2	15	1	2:05	#	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	50 orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	50,000,000	
2	15	1	2:06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				214,302,000				257,019,000
2	15	1	2:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	100 %	20.967.161	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	50,000,000	
2	15	1	2:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	60 %	60.525.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	50,000,000	
2	15	1	2:06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	43 Galon	6.504.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	24,240,000	
2	15	1	2:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	428 buku	262.738.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	19,850,000	
2	15	1	2:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	12 bulan	14.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	13,800,000	

2	15	1	2:06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan Tamu	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	12 bulan	10.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	13,800,000	
2	15	1	2:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	100 kali	116.498.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	99,129,000	
2	15	1	2:07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				25.929.000				1,170,000,000
2	15	1	2:07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang diadakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	1 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	350,000,000	
2	15	1	2:07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang diadakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	32 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	50,000,000	
2	15	1	2:07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	3 unit	25.929.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	40,000,000	
2	15	1	2:07	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	15 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	30,000,000	
2	15	1	2:07	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	1 unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	700,000,000	
2	15	1	2:08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				666,825,718				684,825,718

2	15	1	2:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 surat	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	12,000,000	
2	15	1	2:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Rekening	137.396.916	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	391,825,718	
2	15	1	2:08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	45 buah	172.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	141,000,000	
2	15	1	2:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	120 kali	193.310.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	140,000,000	
2	15	1	2:09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.084.000				422,576,000
2	15	1	2:09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	1 unit	42.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	80,000,000	
2	15	1	2:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	39 unit	93.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	70,000,000	
2	15	1	2:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	170 kali	49.644.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	35,576,000	

2	15	1	2:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	400 m2	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	237,000,000
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				23.637.492.800				27.467.352.000
2	15	2	2:01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				116.702.000				628,200,000
2	15	2	2:01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen masterplan yang disusun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	485,000,000
2	15	2	2:01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	Jumlah laporan pengendalian rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan	116.702.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	143,200,000
2	15	2	2:02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				18.100.000.000				75,000,000
2	15	2	2:02	1	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten /kota yang tersedia	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 titik	2.385.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	25,000,000
2	15	2	2:02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kotayang tersedia	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	20.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	25,000,000
2	15	2	2:02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 rekening	15.695.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	25,000,000
2	15	2	2:03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				1.190.456.000				8,380,234,500

2	15	2	2:03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah DED yang disusun	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	0 Dokumen	0	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	90,000,000
2	15	2	2:03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Luasan Pelebaran Terminal sarana Parkir kendaraan berat yang dipelihara	Kab. Ngawi, Geneng, Klitik	2000 m2	0	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	7,690,000,000
2	15	2	2:03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 kali	422.866.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	80,000,000
2	15	2	2:03	4	Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan pendukung)	Jumlah terminal (Fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	6 lokasi	573.190.000				
2	15	2	2:03	5	Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Terminal tipe C	<i>Jumlah SDM pengelola Terminal Type C yang ditingkatkan kapasitasnya</i>		9 orang	194.400.000				
2	15	2	2:04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				1.484.452.000				1,660,591,656
2	15	2	2:04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten /Kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	1 SIM	1.484.452.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	350,000,000
2	15	2	2:05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				704.135.800				874,480,200

2	15	2	2:05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	10 unit	681.635.800	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	676,480,200
2	15	2	2:05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	1 paket	22.500.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	198,000,000
2	15	2	2:06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.090.000.000				2,654,600,000
2	15	2	2:06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah pengadaan , pemasangan , perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka menejemen dan rekayasa Lalulintas	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	11 unit	951.924.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	2,654,600,000
2	15	2	2:06	3	Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalulintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan Uji coba dan sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan kabupaten/Kota		50 orang	119.500.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	0
2	15	2	2:06	5	Forum Lalulintas dan angkutan jalan Kabupatem /Kota	Jumlah laporan forum Lalulintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165 kali	18.576.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	0
2	15	2	2:07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				0				50,000,000
2	15	2	2:07	3	Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian hasil Andalalin	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian Hasil Andalalin	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	0 kali	50.000.000	PENDAPATAN TRANSFER		90 %	50,000,000

2	15	2	2:08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			604.033.000				342,200,000
2	15	2	2:08	4	Pelaksanaan inspeksi ,audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah laporan inspeksi audit dan pemantauan Pemenuhan Persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	145 kali	604.033.000	PENDAPATAN TRANSFER	90 %	98,912,000
2	15	2	2:09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			92.035.500				1,250,000,000
2	15	2	2:09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang anat kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang tersedia	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	8 bus	92.035.500	PENDAPATAN TRANSFER	90 %	1,250,000,000
2	15	2	2:11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			170.735.000				286,724,000
2	15	2	2:11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	1 dokumen	170.735.000	PENDAPATAN TRANSFER	90 %	236,724,000
2	15	2	2:12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			34.943.500				
2	15	2	2:12	2 3	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan Rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan Trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota)	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	1 SIM	34.943.500	PENDAPATAN TRANSFER	90 %	50,000,000

2	15	3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				0				380,000,000
2	15	3	2:13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				0				380,000,000
2	15	3	2:13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah trap penyebrangan yang dibangun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 lokasi	0	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	90,000,000
2	15	3	2:13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah rehab perahu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 unit	0	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	90,000,000
2	15	3	2:13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	jumlah dokumen trap penyebrangan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	0	PENDAPATAN TRANSFER		100 %	200,000,000
TOTAL									38.067.718.246				47,427,318,601

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 terdiri dari prioritas, sasaran, program prioritas lintas kewenangan, selanjutnya program pembangunan daerah dijabarkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2023. Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi memiliki 2 (Dua) Program .

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Prima” maka ditempuh melalui tujuh misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Ngawi ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, perlu dirumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah, letak dari suatu infrastruktur semakin strategis, mendukung percepatan pertumbuhan agrobisnis, mendukung peningkatan produksi pertanian, lokasi – lokasi sentra perekonomian masyarakat, pendidikan dan pariwisata serta dibutuhkan oleh masyarakat luas maka infrastruktur tersebut menjadi lebih prioritas untuk didanai. Selain itu tingkat kerusakan juga menjadi pertimbangan yang cukup dominan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Tahun 2023 Dinas Perhubungan melaksanakan 1 Program, 11 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus sesuai dengan rancangan awal RKPD. Tidak diperkenankan mengakomodir program atau kegiatan yang tidak tertuang dalam RKPD awal, namun untuk mengurangi ataupun

menambah anggaran sesuai ketersediaan dana masih diperkenankan dengan tetap menyesuaikan kebutuhan yang realistis.

Rumusan rencana program /kegiatan/ sub kegiatan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 Kabupaten Ngawi
 Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Peran gkat Daera h Penan ggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	15						38,067,718,246						37,022,868,918						
2	15	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	%		%	100 %			100 %	14,780,556,718				
2	15	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									49,000,000				
2	15	1	2	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah yang disusun Jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun				4 Dokumen 11 Dokumen	12,875,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pemanta pan infrastru ktur wilayah dan infrastru ktur pertania n guna kemuda han distribus	4 Dokumen 11 Dokumen	15,000,000	DINAS PERH UBUN GAN

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen					i dan peningkatan produktivitas pertanian		15 Dokumen		
2	15	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen 5 Dokumen	3,960,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Dokumen 5 Dokumen	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 5 Dokumen	3,710,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Dokumen 5 Dokumen	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	9,080,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Dokumen	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen				20 Dokumen					
2	15	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	6,018,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Dokumen	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				14 Dokumen				14 Dokumen					

2	15	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	5,708,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	14 Laporan	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,995,276,465						14,037,000,000	
2	15	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				26 Dokumen 134 Orang/Bulan 14 Kali	12,954,805,965		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	26 Dokumen 134 Orang/Bulan 14 Kali	14,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD				4 Laporan	21,478,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi		4 Laporan	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				50 Laporan	18,992,500		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		50 Laporan	17,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						800,000						900,000		
2	15	1	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen		800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Dokumen	900,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						19,660,000						20,620,000		

2	15	1	2	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Dokumen	19,660,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		12 Dokumen	20,620,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah						492,032,361							275,658,000	
2	15	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik				1 Paket 100 %	20,967,161		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Paket 100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,525,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Paket	40,992,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor				60 %							60 %		
2	15	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah air isi ulang yang disediakan				43 Galon	6,504,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		43 Galon	25,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah makanan yang disediakan				968 Kotak							968 Kotak		
						Jumlah minuman yang disediakan				12 Botol							12 Botol		
						Jumlah Paket bulanan logistik kantor yang disediakan				1 Paket							1 Paket		

2	15	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang digandakan				15000 Lembar	262,738,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		15000 Lembar	25,803,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket							1 Paket		
2	15	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	14,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		25 Dokumen	25,803,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	25,929,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		7 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						670,092,620							397,378,718	
2	15	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar				5 Rekening 57 Rekening 1 Rekening	303,982,620		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		5 Rekening 57 Rekening 1 Rekening	397,378,718	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak kendaraan bermotor				1 Unit	42,160,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan				12 Kali							12 Kali		
2	15	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya				39 Unit	93,280,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		39 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				12 Kali							12 Kali		

2	15	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja				170 Kali	49,644,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		170 Kali	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						23,637,492,800							22,242,312,200	
2	15	2	2		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						116,702,000							316,000,000	

2	15	2	2	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					116,702,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian			316,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					18,100,000,000							15,716,000,000	
2	15	2	2	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			159 Unit	2,385,000,000		PENDAPATAN TRANSFER		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		159 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen money yang disusun				1 Dokumen	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah PJU yang dipelihara Jumlah rekening listrik PJU yang dibayar				0 Unit 250 Titik 8 Bulan	15,695,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Unit 250 Titik 8 Bulan	15,696,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						1,190,456,000							1,311,000,000	

2	15	2	2	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal						422,866,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian			520,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)						573,190,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian			791,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	194,400,000		PENDAP ATAN TRANSFER		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Orang	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						1,484,452,000							1,441,602,200	
2	15	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						1,484,452,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian			1,441,602,200	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				47 unit	951,924,000	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	Masyarakat Pengguna Transportasi	47 unit	2,654,600,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Keselamatan Transportasi yang dilakukan				2 Kali	119,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	Masyarakat Pengguna Transportasi	2 Kali	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas yang diadakan				4 Laporan	18,576,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	Masyarakat Pengguna Transportasi	4 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan		laporan	12 laporan	50,000,000						12 laporan	75,000,000	
2	15	2	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				12 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	Masyarakat dan Pengusaha	12 Laporan	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						92,035,500		PENDAPATAN TRANSFER					0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						170,735,000							0	
2	15	2	2	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						170,735,000		PENDAPATAN TRANSFER					0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						34,943,500							0	

2	15	2	2	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						34,943,500		PENDAPATAN TRANSFER					0	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL										38,067,718,246							37,022,868,918		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD, diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ngawi. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja.

Dengan demikian diharapkan Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi akan terlaksana dengan upaya meningkatkan kinerja PD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut :

1. Sinergi Regulasi; diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKP tahun berjalan dalam

koridor RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

2. Sinergi Perencanaan; dalam tahap perencanaan, RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023 harus bersinergi dengan dokumen perencanaan RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2025, RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026. Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan dalam pelaksanaan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintah (Kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar pusat dan daerah.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, maka diperlukan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan dan usulan dari kelurahan dan kecamatan serta usulan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi.

5.2 Kaidah - kaidah Pelaksanaan

Guna memperoleh optimalisasi dan keterpaduan pencapaian hasil terhadap program kegiatan yang tertuang dalam rangka lima tahunan berupa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yang kemudian diturunkan dalam rangka kerja tahunan berupa Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 38.067.718.246,00,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*). Apabila ketersediaan anggaran Pemerintah Kabupaten Ngawi tidak mencukupi dalam

pengalokasian anggaran program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi Tahun 2023, maka akan dilakukan pengkajian ulang dan penerapan skala prioritas terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan perencanaan tahun yang akan datang dimana fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi sebagai pelaksana dalam hal pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ngawi membutuhkan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, sehingga pencapaian kinerja kegiatan yang membutuhkan sumber daya maksimal masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu dibutuhkan penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* terhadap seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai.
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar proses pembangunan yang dilaksanakan mencapai target yang diharapkan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi ini disusun demi mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.



BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen						i dan peningkatan produktivitas pertanian		15 Dokumen		
2	15	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen 5 Dokumen	3,960,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Dokumen 5 Dokumen	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen 5 Dokumen	3,710,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Dokumen 5 Dokumen	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	

2	1 5	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	9,080,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemajuan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Dokumen	10,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen							20 Dokumen		
2	1 5	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	6,018,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemajuan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Dokumen	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				14 Dokumen							14 Dokumen		

2	15	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	5,708,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		14 Laporan	7,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,995,276,465							14,037,000,000	
2	15	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN				26 Dokumen 134 Orang/Bulan 14 Kali	12,954,805,965		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		26 Dokumen 134 Orang/Bulan 14 Kali	14,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD				4 Laporan	21,478,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Keterbukaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi		4 Laporan	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				50 Laporan	18,992,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		50 Laporan	17,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						800,000						900,000		
2	15	1	2	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen		800,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Infrastru ktur Untuk Menduk ung Pengemb angan Ekonomi Dan Pelayana n Dasar	Pemanta pan infrastru ktur wilayah dan infrastru ktur pertania n guna kemuda han distribus i dan peningka tan produkti vitas pertania n		1 Dokumen	900,000	DINAS PERH UBUN GAN
2	15	1	2		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						19,660,000							20,620,000	

2	15	1	2	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Dokumen	19,660,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		12 Dokumen	20,620,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah						492,032,361							275,658,000	
2	15	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik				1 Paket 100 %	20,967,161		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Paket 100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,525,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Paket	40,992,000	DINAS PERHUBUNGAN			
						Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor					60 %									60 %		
2	15	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah air isi ulang yang disediakan				43 Galon	6,504,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		43 Galon	25,500,000	DINAS PERHUBUNGAN			
						Jumlah makanan yang disediakan					968 Kotak									968 Kotak		
						Jumlah minuman yang disediakan					12 Botol										12 Botol	
					Jumlah Paket bulanan logistik kantor yang disediakan				1 Paket								1 Paket					

2	15	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang digandakan				15000 Lembar	262,738,200		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		15000 Lembar	25,803,000	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket							1 Paket		
2	15	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	14,400,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		25 Dokumen	25,803,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	25,929,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		7 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						670,092,620							397,378,718	
2	15	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar				5 Rekening 57 Rekening 1 Rekening	303,982,620		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		5 Rekening 57 Rekening 1 Rekening	397,378,718	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibeli				45 Buah	172,800,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Pemantapan infrastruktur wilayah dan		45 Buah	0	DINAS PERHUBUNGAN

						Jumlah bahan kebersihan yang dibeli					30 Buah				ung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		30 Buah		
						Jumlah pembayaran jasa kebersihan dan keamanan yang dibayar					132 Kali							132 Kali		
2	15	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah materai yang dibeli					120 Kali	193,310,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		120 Kali	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah pembayaran honor					67 Orang/Bulan							67 Orang/Bulan		
2	15	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							185,084,000							0	
2	15	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak kendaraan bermotor					1 Unit	42,160,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi		1 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan					12 Kali							12 Kali		

2	15	2			PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													23,637,492,800										22,242,312,200		
2	15	2	2		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta														116,702,000										316,000,000	
2	15	2	2	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a														116,702,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemanta pan infrastru ktur wilayah dan infrastru ktur pertania n guna kemuda han distribus i dan peningka tan produkti vitas pertania n					316,000,000	DINAS PERH UBUN GAN
2	15	2	2		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta														18,100,000,000										15,716,000,000	

2	15	2	2	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				159 Unit	2,385,000,000		PENDAP ATAN TRANSFER		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		159 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen money yang disusun				1 Dokumen	20,000,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		1 Dokumen	20,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah PJU yang dipelihara Jumlah rekening listrik PJU yang dibayar				0 Unit 250 Titik 8 Bulan	15,695,000,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi		0 Unit 250 Titik 8 Bulan	15,696,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	194,400,000		PENDAP ATAN TRANSFER		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian		0 Orang		0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						1,484,452,000								1,441,602,200	
2	15	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						1,484,452,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian				1,441,602,200	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						704,135,800							0	
2	15	2	2	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						681,635,800		PENDAP ATAN TRANSFER					0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						22,500,000		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	ersentase pembinaan keselamatan transportasi yang dilakukan	%		%	100 %	1,090,000,000						100 %	2,804,600,000	

2	15	2	2	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				47 unit	951,924,000	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	Masyarakat Pengguna Transportasi	47 unit	2,654,600,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Keselamatan Transportasi yang dilakukan				2 Kali	119,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	Masyarakat Pengguna Transportasi	2 Kali	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas yang diadakan				4 Laporan	18,576,000	Kab. Ngawi, Ngawi, Grudo	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	Masyarakat Pengguna Transportasi	4 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan		laporan	12 laporan	50,000,000						12 laporan	75,000,000	
2	15	2	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				12 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian	Masyarakat dan Pengusaha	12 Laporan	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						604,033,000						578,110,000		
2	15	2	2	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						604,033,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantauan infrastruktur wilayah dan infrastruktur pertanian guna kemudahan distribusi dan peningkatan produktivitas pertanian			578,110,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						92,035,500							0	
2	15	2	2	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						92,035,500		PENDAPATAN TRANSFER					0	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	2	2		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						170,735,000						0	
2	15	2	2	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						170,735,000		PENDAPATAN TRANSFER				0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	2	2		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						34,943,500						0	
2	15	2	2	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota						34,943,500		PENDAPATAN TRANSFER				0	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL											38,067,718,246						37,022,868,918	

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kabupaten Ngawi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Pr ogram,Keg iatan, dan Sub Kegiatan	Data Cap aian pada Tah un Awal Pere nca naa n (202 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangk at Daerah Penang g Jawab	Lokasi
						Tahun - N (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15					31,717,283, 374.00		40,676,188, 600.51		40,189,44 5,522.81		40,600,723, 506.03		41,010,18 6,534.35		41,433,664, 887.42		235,627,4 92,425.12		
Menin gkatn ya kualit as dan pemer ataan infrast ruktur dasar	Meningk atnya kualitas pelayan an perhubu ngan	2.15 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentas e Pemenuha n penunjang urusan Pemerinta h daerah dalam setahun	100 %	100 %	12,549,898,6 74.00	100 %	12,900,231,2 44.51	100 %	13,022,01 1,147.81	100 %	13,144,975,0 01.03	100 %	13,269,13 4,387.35	100 %	13,394,501,1 02.42	100 %	78,280,75 1,557.12	Perhubu ngan	Kab Ngawi

		2.15 .01. 2.01	Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengganaan, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu			40,180,000. 00		40,180,000. 00		40,180,00 0.00		40,180,000. 00		40,180,00 0.00		100,180,00 0.00		260,900,0 00.00	Perhubu ngan	Kab Ngawi
		2.15. 01.2. 01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			28,180,000. 00		28,180,000. 00		16,680,00 0.00		16,680,000. 00		16,680,00 0.00		80,000,000. 00		158,220,0 00.00			
				Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	11 Dok ume n	11 Dok ume n	20,000,000.0 0	11 Dok ume n	20,000,000.0 0	11 Dok ume n	16,680,00 0.00	11 Dok ume n	16,680,000.0 0	11 Dok ume n	11D oku men	80,000,000.0 0	55 Dok ume n	150,040,0 00.00			
				Jumlah dokumen pengangga ran PD yang disusun	4 Dok ume n	4 Dok ume n	8,180,000.00	4 Dok ume n	8,180,000.00	4 Dok ume n	-	4 Dok ume n	-	4 Dok ume n	4Do kum en	-	20 doku men	8,180,000. 00			
		2.15. 01.2. 01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							3,000,000 .00		3,000,000.0 0		3,000,000 .00		2,680,000.0 0		11,680,00 0.00			
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD	Dok ume n					6 Dok ume n	3,000,000. 00	6 Dok ume n	3,000,000.00	6 Dok ume n	6 Dok ume n	2,680,000.00	6 Dok ume n	11,680,00 0.00			

		2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00		10,000,000.00		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen				4 Dokumen	2,500,000.00	4 Dokumen	2,500,000.00	4 Dokumen	2,500,000.00	4 Dokumen	2,500,000.00	4 Dokumen	10,000,000.00		
		2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		12,000,000.00		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				4 Dokumen	3,000,000.00	4 Dokumen	3,000,000.00	4 Dokumen	3,000,000.00	4 Dokumen	3,000,000.00	4 Dokumen	12,000,000.00		
		2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00		12,000,000.00		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen				5 Dokumen	3,000,000.00	5 Dokumen	3,000,000.00	5 Dokumen	3,000,000.00	5 Dokumen	3,000,000.00	5 Dokumen	12,000,000.00		

		2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00		9,000,000.00		57,000,000.00		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Dokumen	12,000,000.00	6 Dokumen	12,000,000.00	6 Dokumen	12,000,000.00	6 Dokumen	12,000,000.00	6 Dokumen	12,000,000.00	6 Dokumen	9,000,000.00	6 Dokumen	57,000,000.00		
		215.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu			11,089,543,956.00		11,576,533,526.51		11,691,908,736.81		11,808,437,795.03		11,926,132,142.35		12,076,960,432.42		59,079,972,633.12	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11,062,543,956.00		11,549,530,526.51		11,664,905,736.81		11,781,434,795.03		11,899,129,142.35		12,030,000,432.42		58,925,000,633.12		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang /Bulan	14 Bulan	11,062,543,956.00	14 Bulan	11,537,530,526.51	14 Bulan	11,652,905,736.81	14 Bulan	11,769,434,795.03	14 Bulan	11,887,129,142.35	14 Bulan	12,006,000,432.42		58,853,000,633.12		
				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	26 Dokumen	0	-	26 Dokumen	12,000,000.00	26 Dokumen	12,000,000.00	26 Dokumen	12,000,000.00	26 Dokumen	12,000,000.00	26 Dokumen	24,000,000.00	130 dokumen	72,000,000.00		

		2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			9,954,000.00		9,957,000.00		9,957,000.00		9,957,000.00		9,957,000.00		19,914,000.00		59,742,000.00		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	1 Dokumen	9,954,000.00	1 Dokumen	9,957,000.00	1 Dokumen	9,957,000.00	1 Dokumen	9,957,000.00	1 Dokumen	9,957,000.00	1 Dokumen	19,914,000.00	5 dokumen	59,742,000.00		
		2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			17,046,000.00		17,046,000.00		17,046,000.00		17,046,000.00		17,046,000.00		27,046,000.00		95,230,000.00		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48Laporan	48 Dokumen	10,000,000.00	48 Dokumen	10,000,000.00	48 Dokumen	10,000,000.00	48 Dokumen	10,000,000.00	48 Dokumen	10,000,000.00	48 Dokumen	20,000,000.00	240 Dokumen	60,000,000.00		

				Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	0	2 Dokumen	7,046,000.00	2 Dokumen	7,046,000.00	2 Dokumen	7,046,000.00	2 Dokumen	7,046,000.00	2 Dokumen	7,046,000.00	2 Dokumen	7,046,000.00	10 Dokumen	35,230,000.00		
		2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang difasilitasi dalam setahun			3,000,000.00		800,000.00		-		-		-		-		800,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3,000,000.00		800,000.00		-		-		-		-		800,000.00		
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 kali	3,000,000.00	1 kali	800,000.00		-		-		-		-		800,000.00		
				Jumlah pembayaran asuransi mobil jabatan/operasional	0														-		
		2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian realisasi retribusi daerah terhadap target tahun berkenaan			11,450,000.00		19,620,000.00		19,620,000.00		19,620,000.00		19,620,000.00		19,620,000.00		98,100,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi				11,450,000.00		19,620,000.00		19,620,000.00		19,620,000.00		19,620,000.00		19,620,000.00		98,100,000.00		

			Daerah																		
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	11,450,000.00	12 Dokumen	19,620,000.00	12 Dokumen	19,620,000.00	12 Dokumen	19,620,000.00	12 Dokumen	19,620,000.00	12 Dokumen	19,620,000.00	60 Dokumen	98,100,000.00		
		15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaian dalam setahun			-		35,000,000.00		242,000,000.00		110,000,000.00		109,000,000.00		107,000,000.00		603,000,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		35,000,000.00		242,000,000.00		75,000,000.00		59,000,000.00		55,000,000.00		466,000,000.00		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0		-	290 meter	35,000,000.00	290 meter	82,000,000.00	-	-	-	-	-	-	290 meter	117,000,000.00		

				Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan	0		-	-	145 potong	60,000,000.00	145 potong	45,000,000.00		-		145 potong	105,000,000.00			
				Jumlah pakaian Olahraga yang dibeli/diadakan	0		-	-	145 stel	80,000,000.00		-	145 orang	59,000,000.00		195 stel	139,000,000.00			
				Jumlah atribut pakaian yang dibeli/diadakan	0		-	-	145 buah	20,000,000.00		-		-	145 buah	15,000,000.00	195 buah	35,000,000.00		
				Jumlah sepatu olahraga yang dibeli/diadakan	0		-	-			145 pasang	30,000,000.00			145 pasang	40,000,000.00	195 pasang	70,000,000.00		
		2.15.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													2,000,000.00				
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen										10 kali	2,000,000.00				
		2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	-		-		10,000,000.00		-		-		10,000,000.00		

				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	0	-	-	-	5 orang	10,000,000.00		-		-	5 orang	10,000,000.00		
		2.15.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-				50,000,000.00		-		50,000,000.00		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	-	0	-	-	-	-	-	145 orang	50,000,000.00		-	145 orang	50,000,000.00		
		2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		25,000,000.00		-		50,000,000.00		75,000,000.00		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	-	0	-	-	-	30 orang	25,000,000.00		-	145 orang	50,000,000.00	175 orang	75,000,000.00		
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun			383,903,000.00	214,302,000.00	268,284,600.00	234,305,000.00	243,032,000.00	243,373,000.00	1,203,296,600.00							Perhubungan	Kab Ngawi

		2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				16,291,000.00		16,291,000.00		16,291,000.00		16,291,000.00		16,230,000.00		16,291,000.00		81,394,000.00		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%		16,291,000.00	100%	16,291,000.00	100%	16,291,000.00	100%	16,291,000.00	100%	16,230,000.00	100%	16,291,000.00	100%	81,394,000.00		
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50,060,000.00		40,992,000.00		40,992,000.00		40,992,000.00		50,060,000.00		50,060,000.00		223,096,000.00		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60%	60%		50,060,000.00	60%	40,992,000.00	60%	40,992,000.00	60%	40,992,000.00	60%	50,060,000.00	60%	50,060,000.00	60%	223,096,000.00		
		2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24,240,000.00		24,240,000.00		24,240,000.00		24,240,000.00		24,240,000.00		24,240,000.00		121,200,000.00		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1068 Kota	968 Kota		22,506,000.00	968 Kota	22,506,000.00	968 Kota	22,506,000.00	968 Kota	22,506,000.00	968 Kota	22,506,000.00	968 Kota	22,506,000.00	4840 kota	112,530,000.00		

				Jumlah minuman yang disediakan	12 Dus	12 Dus	504,000.00	12 Dus	504,000.00	12 Dus	504,000.00	12 Dus	504,000.00	12 Dus	504,000.00	12 Dus	504,000.00	60 dus	2,520,000.00		
				Jumlah air isi ulang yang disediakan	0	43 galon	1,230,000.00	43 galon	1,230,000.00	43 galon	1,230,000.00	43 galon	1,230,000.00	43 galon	1,230,000.00	43 galon	1,230,000.00	215 galon	6,150,000.00		
		2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan				205,000.00		19,850,000.00		20,398,600.00		29,850,000.00		29,850,000.00		29,850,000.00		129,798,600.00		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan	428 buku	428 lembar	205,000,000.00	428 lembar	10,850,000.00	428 lembar	11,398,600.00	428 lembar	10,850,000.00	428 lembar	10,850,000.00	428 lembar	10,850,000.00	2140 lembar	54,798,600.00		
				Jumlah barang yang digandakan	1500 lembar	-	-	3000 Lembar	1,500,000.00	3000 Lembar	1,500,000.00	1350 lembar	10,000,000.00	1350 lembar	10,000,000.00	1350 lembar	10,000,000.00	6750 lembar	33,000,000.00		
				Jumlah iklan/publikasi media cetak	0	-	-	3 Kali	7,500,000.00	3 Kali	7,500,000.00	3 Kali	9,000,000.00	3 Kali	9,000,000.00	3 Kali	9,000,000.00	15 kali	42,000,000.00		
		2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				18,303,000.00		13,800,000.00		18,803,000.00		18,803,000.00		18,803,000.00		18,803,000.00		89,012,000.00		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	84 eksemplar	18,303,000.00	84 eksemplar	13,800,000.00	84 eksemplar	13,803,000.00	12 Bulan	13,803,000.00	84 eksemplar	13,803,000.00	84 eksemplar	13,803,000.00	504 eksemplar	69,012,000.00		

				Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	0	-	0	-	5 buku	5,000,000.00	5 buku	5,000,000.00	5 buku	5,000,000.00	5 buku	5,000,000.00	25 buku	20,000,000.00		
		2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00				
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					9 Laporan	2,500,000.00	9 Laporan	2,500,000.00	9 Laporan	2,500,000.00	9 Laporan	2,500,000.00				
				Jumlah Mamin kunjungan Tamu						120 Kota-k	2,500,000.00	120 Kota-k	2,500,000.00	120 Kota-k	2,500,000.00	120 Kota-k	2,500,000.00				
		2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70,009,000.00		99,129,000.00		142,560,000.00		99,129,000.00		98,849,000.00		99,129,000.00		538,796,000.00		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Kali	213 Kali	50,000,000.00	269 Kali	77,849,000.00	313 Kali	100,000,000.00	269 Kali	77,849,000.00	269 Kali	77,849,000.00	269 Kali	77,849,000.00	1345 kali	411,396,000.00		
				Jumlah Mamin rapat SKPD yang disediakan	75 Kali	97 Kali	20,009,000.00	100 Kali	21,280,000.00	131 Kali	42,560,000.00	100 Kali	21,280,000.00	100 Kali	21,000,000.00	100 Kali	21,280,000.00	531 kali	127,400,000.00		

		2.15 .01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentas e barang milik daerah penunjang urusan pemerinta h daerah yang diadakan dalam setahun			19,000,000. 00		61,694,000. 00		30,200,00 0.00		315,000,00 0.00		277,000,0 00.00		60,940,000. 00		744,834,0 00.00	Perhubu ngan	Kab Ngawi
		2.15. 01.2. 07.0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-				300,000,00 0.00						300,000,0 00.00		
				Jumlah Unit Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							1 Unit		300,000,000. 00						300,000,0 00.00		
		2.15. 01.2. 07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-		-		-		200,000,0 00.00		-		200,000,0 00.00		
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Disediakan	0		-		-					1 Unit	200,000,0 00.00				200,000,0 00.00		

		2.15.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor											30,000,000.00						
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan										1 Unit	30,000,000.00						
		2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			-		32,094,000.00		19,200,000.00		5,000,000.00		12,000,000.00		-		68,294,000.00		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		-	32 unit	32,094,000.00	19 unit	19,200,000.00	2 unit	5,000,000.00	6 unit	12,000,000.00	-	-		68,294,000.00		
		2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19,000,000.00		29,600,000.00		10,000,000.00		5,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		64,600,000.00		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5 Unit	19,000,000.00	3 Unit	29,600,000.00	3 Unit	10,000,000.00	3 Unit	5,000,000.00	3 Unit	10,000,000.00	3 Unit	10,000,000.00	15 unit	64,600,000.00		
		2.15.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya									2,500,000.00								
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan								3 Unit	2,500,000.00								
		2.15.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud									2,500,000.00								

				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan						3 Unit	2,500,000.00								
		2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-		1,000,000.00		-		-		-		1,000,000.00		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		-	-	1 lokasi	1,000,000.00	-	-		-		-	1 lokasi	1,000,000.00		
		2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-		-		-		25,000,000.00		50,940,000.00		75,940,000.00		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0				-	-	-	-	1 unit	25,000,000.00	1 unit	25,940,000.00	2 unit	50,940,000.00		

				Luasan sarana prasarana gedung kantor yang dibangun	0		-		-		-	-		-	50 M2	25,000,000.00	50 m2	25,000,000.00			
		2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun			729,867,718.00		631,825,718.00		538,825,811.00		461,140,206.00		497,878,245.00		540,135,670.00		2,669,805,650.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,000,000.00		3,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		27,000,000.00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 surat	40 surat	1,000,000.00	120 surat	3,000,000.00	120 surat	6,000,000.00	120 surat	6,000,000.00	120 surat	6,000,000.00	120 surat	6,000,000.00	600 surat	27,000,000.00		
		2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				449,747,718.00		356,825,718.00		391,825,811.00		386,140,206.00		386,878,995.00		392,879,000.00		1,914,549,730.00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Rekening	1 Rekening	3,179,000.00	1 Rekening	3,179,000.00	1 Rekening	3,179,000.00	1 Rekening	3,179,000.00	1 Rekening	3,179,000.00	1 Rekening	3,179,000.00	5 rekening	15,895,000.00		
				Jumlah rekening listrik yang dibayar	57 rekening	57 rekening	407,868,718.00	57 rekening	314,946,718.00	57 rekening	349,946,811.00	57 rekening	340,000,006.00	57 rekening	339,999,995.00	57 rekening	340,000,000.00	285 rekening	1,684,893,530.00		

				Jumlah Iklan Publikasi media cetak dan elektronik																
				Jumlah rekening air yang dibayar	0							6 Rekening	4,261,200.00	-	-	6 Rekening	6,000,000.00	12 rekening	10,261,200.00	
				Jumlah rekening internet yang dibayar	4 Rekening	5 Rekening	38,700,000.00	5 Rekening	38,700,000.00	5 Rekening	38,700,000.00	5 Rekening	38,700,000.00	5 Rekening	38,700,000.00	5 Rekening	38,700,000.00	25 rekening	193,500,000.00	
				Jumlah penambahan daya listrik	0	0	-	0	-					1 lokasi	5,000,000.00			1 lokasi	5,000,000.00	
				Jumlah pemasangan daya listrik	0											1 lokasi	5,000,000.00	1 lokasi	5,000,000.00	
		2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				177,000,000.00		141,000,000.00		141,000,000.00		69,000,000.00		104,999,250.00		141,256,670.00		597,255,920.00	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Buah	45 Buah	6,650,000.00	45 Buah	6,650,000.00	45 Buah	6,650,000.00	45 Buah	6,650,000.00	45 Buah	6,649,250.00	45 Buah	6,650,000.00	225 Buah	33,249,250.00	
				Jumlah bahan kebersihan yang dibeli	40 buah	30 Buah	2,350,000.00	30 Buah	2,350,000.00	30 Buah	2,350,000.00	30 Buah	2,350,000.00	30 Buah	2,350,000.00	30 Buah	2,606,670.00	150 buah	12,006,670.00	

				Jumlah pembayaran jasa kebersihan	132 Kali	132 Kali	168,000,000.00	96 Kali	32,000,000.00	96 Kali	32,000,000.00	96 Kali	18,000,000.00	96 Kali	48,000,000.00	96 Kali	48,000,000.00	612 kali	178,000,000.00		
				Jumlah pembayaran jasa keamanan	0	0	-	144 Kali	100,000,000.00	144 Kali	100,000,000.00	144 Kali	30,000,000.00	144 Kali	48,000,000.00	144 Kali	72,000,000.00	96 kali	350,000,000.00		
				Jumlah pembayaran jasa operator	0	0	-	0	-	-	-	1 orang	12,000,000.00	-	-	1 orang	12,000,000.00	2 orang	24,000,000.00		
		2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				102,120,000.00		131,000,000.00		131,000,000.00		131,000,000.00		131,000,000.00		131,000,000.00		655,000,000.00		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	67orang/bl	67orang/bl	95,140,000.00	67orang/bl	124,020,000.00	67orang/bl	124,020,000.00	67orang/bl	124,020,000.00	67orang/bl	124,020,000.00	67orang/bl	124,020,000.00	335 orang/bln	620,100,000.00		
				Jumlah pembayaran lembur	110 Kali	120 Kali	6,980,000.00	120 Kali	6,980,000.00	120 Kali	6,980,000.00	120 Kali	6,980,000.00	120 Kali	6,980,000.00	120 Kali	6,980,000.00	600 kali	34,900,000.00		

		2.15 .01. 2.09	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentas e barang milik daerah penunjang urusan pemerinta han daerah yang terpelihar a dalam setahun			272,954,00 0.00		320,276,00 0.00		190,992,0 00.00		156,292,00 0.00		156,292,0 00.00		246,292,00 0.00		1,070,144, 000.00	Perhubu ngan	Kab Ngawi
		2.15. 01.2. 09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		27,000,000. 00		27,000,00 0.00		27,000,000. 00		27,000,00 0.00		27,000,000. 00		135,000,0 00.00			
				Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 kali	-		12 kali	25,000,000.0 0	12 kali	25,000,00 0.00	12 kali	25,000,000.0 0	12 kali	25,000,00 0.00	12 kali	25,000,000.0 0	60 kali	125,000,0 00.00		
				Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya	6 Unit	-		1 Unit	2,000,000.00	1 Unit	2,000,000. 00	1 Unit	2,000,000.00	1 Unit	2,000,000. 00	1 Unit	2,000,000.00	5 unit	10,000,00 0.00		

		2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			185,980,000.00		59,700,000.00		57,300,000.00		57,300,000.00		57,300,000.00		57,300,000.00		288,900,000.00		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12K ali	12K ali	35,980,000.00	12K ali	36,000,000.00	12K ali	33,600,000.00	12K ali	33,600,000.00	12K ali	33,600,000.00	12K ali	33,600,000.00	60 kali	170,400,000.00		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	39 Unit	39 Unit	150,000,000.00	39 Unit	23,700,000.00	39 Unit	23,700,000.00	39 Unit	23,700,000.00	39 Unit	23,700,000.00	39 Unit	23,700,000.00	195 unit	118,500,000.00		
		2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21,992,000.00		35,576,000.00		21,992,000.00		21,992,000.00		21,992,000.00		21,992,000.00		123,544,000.00		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Kali	170 Kali	21,992,000.00	170 Kali	35,576,000.00	130 Kali	21,992,000.00	130 Kali	21,992,000.00	130 Kali	21,992,000.00	130 Kali	21,992,000.00	650 kali	123,544,000.00		
		2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			64,982,000.00		198,000,000.00		84,700,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		140,000,000.00		522,700,000.00		

				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	100 M2	50 M2	64,982,000.00	400 M2	198,000,000.00	110 m2	84,700,000.00	100 m2	50,000,000.00	100 m2	50,000,000.00	100 m2	140,000,000.00	500 m2	522,700,000.00		
		2.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang sesuai standard keselamatan lalulintas	0.00 26%	0.00 24%	19,167,384,700.00	0.00 24%	27,750,957,356.00	0.00 23%	27,142,434,375.00	0.00 22%	27,430,748,505.00	0.00 22%	27,631,052,147.00	0.00 21%	28,014,163,785.00	0.00 21%	157,136,740,868.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.02.2,01	Penetapan Rencana Induk jaringan LLAJ kabupaten/ Kota	Prosentase ruas jalan yang memiliki kelengkapan jalan baik			-		628,200,000.00		115,000,000.00		50,000,000.00		15,000,000.00		30,000,000.00		838,200,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.02.2,01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota				-		485,000,000.00		5,000,000.00		10,000,000.00		2,000,000.00		5,000,000.00		507,000,000.00		
				Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	485,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	5 dokumen	507,000,000.00		
		2.15.02.2,01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota				-		143,200,000.00		10,000,000.00		15,000,000.00		3,000,000.00		10,000,000.00		181,200,000.00		

				Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	1 kali	-	-	1 kali	143,200,000.00	1kali	10,000,000.00	1kali	15,000,000.00	1kali	3,000,000.00	1kali	10,000,000.00	5 kali	181,200,000.00		
		2.15.02.2,01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota			-	-				100,000,000.00		25,000,000.00		10,000,000.00		15,000,000.00		150,000,000.00	-	
				Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota																	
				Jumlah dokumen inventarisasi perlengkapan jalan kabupaten kota	0					1 Dokumen	10,000,000.00							1 Dokumen	10,000,000.00		
				Jumlah dokumen LHR	0					1 Dokumen	25,000,000.00							1 Dokumen	25,000,000.00		
				Jumlah dokumen RAS	0							1 Dokumen	25,000,000.00					1 Dokumen	25,000,000.00		

				Jumlah dokumen Jalur khusus sepeda	0								1 Dokumen	10,000,000.00			1 Dokumen	10,000,000.00			
				Jumlah dokumen daerah rawan kecelakaan	0				1 Dokumen	35,000,000.00							1 Dokumen	35,000,000.00			
				jumlah Tatraloc/ tatanan transportasi lokal	0				1 Dokumen	30,000,000.00							1 Dokumen	30,000,000.00			
				Jumlah data v/c rasio ruas jalan	0									1 Dokumen	15,000,000.00		1 Dokumen	15,000,000.00			
																		-			
		2.15.02.2,02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/ Kota	Prosentase ruas jalan yang PJUnya dalam kondisi baik			16,830,465,200.00		20,875,000,000.00		20,854,750,000.00		20,844,500,000.00		20,850,500,000.00		20,849,300,000.00		104,274,050,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.02.2,02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Kabupaten/ Kota				2,300,000,000.00		3,585,000,000.00		3,545,000,000.00		3,555,000,000.00		3,565,000,000.00		3,565,000,000.00		17,815,000,000.00		
				Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	0	-	1,500,000,000.00	6 Titik	2,085,000,000.00	5Titik	2,045,000,000.00	5Titik	2,055,000,000.00	5Titik	2,065,000,000.00	5Titik	2,065,000,000.00	1 paket	10,315,000,000.00		

				Jumlah Desa yang dimeterisasi		-	800,000,000	1 Desa	1,500,000,000.00	1 Desa	1,500,000,000.00	1 Desa	1,500,000,000.00	1 Desa	1,500,000,000.00	1 Desa	1,500,000,000.00	5 Desa	7,500,000,000.00			
		2.15.02.2,02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				400,000,000.00		40,000,000.00		59,750,000.00		39,500,000.00		35,500,000.00		34,300,000.00		209,050,000.00			
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		Unit	200,000,000.00													200,000,000.00		
				Jumlah dokumen money yang disusun	0	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	40,000,000.00	1 Dokumen	59,750,000.00	1 Dokumen	39,500,000.00	1 Dokumen	35,500,000.00	1 Dokumen	34,300,000.00	1 dokumen	209,050,000.00			
		2.15.02.2,02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				14,130,465,200.00		17,250,000,000.00		17,250,000,000.00		17,250,000,000.00		17,250,000,000.00		17,250,000,000.00		86,250,000,000.00			
				Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	-	11,760,930,400.00	4 Titik	550,000,000.00	3 Titik	550,000,000.00	3 Titik	550,000,000.00	3 Titik	550,000,000.00	3 Titik	550,000,000.00	16 titik	2,750,000,000.00			
				Jumlah rekeningPJU yang dibayarkan			2,369,534,800.00	10 Bulan	16,700,000,000.00	10 Bulan	16,700,000,000.00	10 Bulan	16,700,000,000.00	10 Bulan	16,700,000,000.00	10 Bulan	16,700,000,000.00	50 Bulan	83,500,000,000.00			
		2.15.02.2,03	Pengelolaan Terminal penumpang Tipe C	Prosentase sarana dan prasarana terminal dalam kondisi baik			288,405,000.00		600,234,500.00		983,500,000.00		1,091,000,000.00		1,181,000,000.00		874,000,000.00		4,729,734,500.00	Perhubungan	Kab Ngawi	

		2.15.02.2,03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C			-		-		90,000,000.00		25,000,000.00		75,000,000.00		6,500,000.00		196,500,000.00		
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	90,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	75,000,000.00	1 dokumen	6,500,000.00	5 dokumen	196,500,000.00		
		2.15.02.2,03.02	Pembangunan Gedung Terminal			-		-				90,000,000.00		90,000,000.00		-		180,000,000.00		
			Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun								1 Lokasi	50,000,000.00						50,000,000.00		
			Luasan terminal sarana parkir kendaraan berat	1200 m2		-		-		-	4100 m2	40,000,000.00				-	4100 m2	40,000,000.00		
			Luasan pelebaran terminal sarana parkir kendaraan berat yang dipelihara	1100 M2		-		-		-			2000 m2	90,000,000.00		-	2000 m2	90,000,000.00		
		2.15.02.2,03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			198,665,000.00		80,000,000.00		699,000,000.00		781,500,000.00		826,500,000.00		666,500,000.00		3,053,500,000.00		

				Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	0		-		-	1Lokasi	25,000,000.00	1Lokasi	50,000,000.00	1Lokasi	50,000,000.00	1Lokasi	50,000,000.00	1Lokasi	175,000,000.00		
				Jumlah halte yang dibangun	0		-		-	6 unit	35,000,000.00	2unit	110,000,000.00	3 unit	135,000,000.00		12,000,000.00	8 unit	292,000,000.00		
				Jumlah Pemeliharaan Terminal Geneng	1Lokasi	1Lokasi	198,665,000.00	1Lokasi	40,000,000.00	1Lokasi	50,000,000.00	1Lokasi	15,000,000.00	1Lokasi	25,000,000.00	1Lokasi	99,250,000.00	5 lokasi	229,250,000.00		
				Jumlah Pemeliharaan Terminal Karangjati	1Lokasi	-	-	1Lokasi	40,000,000.00	1Lokasi	64,000,000.00	1Lokasi	81,500,000.00	1Lokasi	91,500,000.00	1Lokasi	71,750,000.00	5 lokasi	348,750,000.00		
				Jumlah Pemeliharaan Terminal Ngrambe	1Lokasi		-		-	1Lokasi	175,000,000.00	1Lokasi	175,000,000.00	1Lokasi	175,000,000.00	1Lokasi	90,000,000.00	4 lokasi	615,000,000.00		
				Jumlah Pemeliharaan Terminal Gendingan	1Lokasi		-		-	1Lokasi	175,000,000.00	1Lokasi	175,000,000.00	1Lokasi	175,000,000.00	1Lokasi	90,000,000.00	4 lokasi	615,000,000.00		
				Jumlah Pemeliharaan Sarana Parkir Kendaraan Berat	1Lokasi		-		-	1Lokasi	175,000,000.00	1Lokasi	175,000,000.00	1Lokasi	175,000,000.00	1Lokasi	90,000,000.00	4 lokasi	615,000,000.00		
				Luasan pagar terminal yang dibangun	1Lokasi		-		-							2000 m2	163,500,000.00	2000 m2	163,500,000.00		
		2.15.02.2,03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)				89,740,000.00		520,234,500.00		158,500,000.00		158,500,000.00		153,500,000.00		165,000,000.00		1,155,734,500.00		

				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1100 m2					-		-		-	4028 m2	40,000,000.00	4028 m2	40,000,000.00			
				Jumlah Rehabilitasi Pos Terpadu	0	-	-	6 loka si	73,000,000.00	6 loka si	58,500,000.00	6 loka si	58,500,000.00	6 loka si	53,500,000.00		-	24 loka si	243,500,000.00		
				Jumlah Pembuatan Pos Jaga dan Portal	0	-	-	6 loka si	73,000,000.00	6 loka si	50,000,000.00	6 loka si	50,000,000.00	6 loka si	50,000,000.00		-	24 loka si	223,000,000.00		
				Jumlah rehabilitasi Pos Jaga Portal	0	-	-	3 loka si	86,000,000.00	3 loka si	50,000,000.00	3 loka si	50,000,000.00	3 loka si	50,000,000.00		-	20 loka si	236,000,000.00		
				Luasan Terminal gendingan angkutan orang yang dipelihara	1200 M2	1715 M2	89,740,000.00	1715 M2	122,000,000.00		-		-					1715 M2	122,000,000.00		
				Luasan terminal sarana Parkir kendaraan berat yang dipelihara	1500 M2	-	-	4028 M2	120,234,500.00									4028 M2	120,234,500.00		
				Jumlah Pengadaan Sarana Pendukung Terminal (CCTV)	0	-	-	2 Loka si	46,000,000.00									2 Loka si	46,000,000.00		
				Luasan rehabilitasi Gedung Rapat dan CCTV	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 m2	125,000,000.00	200 m2	125,000,000.00			

		2.15.02.2,03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C							36,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00		36,000,000.00		144,000,000.00		
			Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya					3 orang	36,000,000.00	3 orang	36,000,000.00	3 orang	36,000,000.00	3 orang	36,000,000.00	15 orang	144,000,000.00			
		2.15.02.2,04	Penerbitan izin penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase pengelolaan Parkir yang sesuai standart			1,194,700,500.00	1,310,591,656.00	1,691,499,975.00	1,539,748,505.00	1,608,998,947.00	2,200,999,985.00	8,351,839,068.00	Perhubungan	Kab Ngawi					
		2.15.02.2,04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-	-	-	-	-	80,500,000.00	-	80,500,000.00							

			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0		-		-		-		1 SIM	80,500,00 0.00		-	1 SIM	80,500,00 0.00			
	2.15.02.2,04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1,194,700,500.00		1,310,591,656.00		1,691,499,975.00			1,539,748,505.00				1,528,498,947.00		2,200,999,985.00	8,271,339,068.00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangnya Fasilitas	12B ulan	12B ulan	1,194,700,500.00	12B ulan	938,183,257.00	12B ulan	966,328,754.00	12B ulan	995,318,617.00	12B ulan	1,025,178,176.00	12B ulan	1,055,933,521.00	12B ulan	4,980,942,325.00			

				Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota																	
				Jumlah Tim Pelaksana	1 Tim	-	-	1 Tim	48,000,000.00	1 Tim	48,000,000.00	1 Tim	48,000,000.00	1 Tim	48,000,000.00	1 Tim	48,000,000.00	5 Tim	240,000,000.00		
				Jumlah koordinasi pengawasan	19 Lokasi	-	-	19 Lokasi	94,108,399.00	12 Lokasi	38,371,221.00	3 lokasi	3,129,888.00			11 lokasi	36,766,464.00	35 lokasi	172,375,972.00		
				Jumlah pengendalian dan penertipan parkir perparkiran	0		-		-		-	70 orang	101,500,000.00	70 orang	99,520,771.00	200 orang	800,000,000.00	340 orang	1,001,020,771.00		
				Jumlah dokumen parkir	0	-	-	-	-	1 dokumen	88,500,000.00		-		-		-	1 dokumen	88,500,000.00		
				Jumlah dokumen halte	0	-	-	-	-		-	1 dokumen	40,000,000.00		-		-	1 dokumen	40,000,000.00		
				jumlah dokumen perlintasan sebidang	0	-	-	-	-		-	1 dokumen	91,500,000.00		-		-	1 dokumen	91,500,000.00		
				Jumlah dokumen terminal	0	-	-	-	-		-		-	1 dokumen	95,500,000.00		-	1 dokumen	95,500,000.00		
				Jumlah pengadaan alat penindakan parkir	6 Unit	-	-	9 Unit	31,500,000.00	9 Unit	31,500,000.00	9 Unit	31,500,000.00	9 Unit	31,500,000.00	9 Unit	31,500,000.00	45 unit	157,500,000.00		
				Jumlah alat pendukung parkir	0	-	-	1 unit	3,500,000.00	1 unit	3,500,000.00	1 unit	3,500,000.00	1 unit	3,500,000.00	1 unit	3,500,000.00	5 unit	17,500,000.00		

				Jumlah cetak parkir berlanggan an	0	-	-	1 Paket	195,300,000.00	1 Paket	195,300,000.00	1 Paket	195,300,000.00	1 Paket	195,300,000.00	1 Paket	195,300,000.00	5 unit	976,500,000.00		
				Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Bidang	0		-		-	1 unit	300,000,000.00							1 unit	300,000,000.00		
				Jumlah Pemeliharaan kendaraan operasional 1 Roda 3 (tiga) 2 unit (bbm+servise+jasa angkut sampah)	0		-		-	3 unit	20,000,000.00	3 unit	20,000,000.00	3 unit	20,000,000.00	3 unit	20,000,000.00	9 unit	80,000,000.00		
				Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional bidang	0		-		-		-	10 Unit	10,000,000.00	10 Unit	10,000,000.00	10 Unit	10,000,000.00	30 unit	30,000,000.00		
		2.15.02.2,05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang layak jalan			270,245,000.00		874,480,200.00		723,349,000.00		1,044,330,200.00		1,071,610,000.00		1,090,902,800.00		4,804,672,200.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.02.2,05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				211,365,000.00		676,480,200.00		625,830,200.00		874,330,200.00		881,610,000.00		892,902,800.00		3,951,153,400.00		

				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaran Bermotor yang Tersedia	10 Unit	10 Unit	211,365,000.00	10 Unit	195,000,000.00	10 Unit	198,000,000.00	10 Unit	198,000,000.00	10 Unit	210,000,000.00	10 Unit	220,000,000.00	50 unit	1,021,000,000.00		
				Jumlah logistik pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terpenuhi	2700 Set	-	-	5700 Set	204,630,000.00	6000 Set	215,400,000.00	7000 Set	251,300,000.00	8900 Set	319,510,000.00	9000 Set	323,100,000.00	3660 set	1,313,940,000.00		
				Jumlah Pengadaan sarana prasarana penunjang pengujian berkala	0	-	-	1 Unit	137,750,200.00	1 Unit	127,830,200.00	1 Unit	133,930,200.00	1 Unit	140,100,200.00	1 Unit	136,100,200.00	5 unit	675,711,000.00		
				Jumlah Pengadaan alat uji	1 Unit	-	-	1 Unit	57,000,000.00			1 Unit	196,500,000.00	1 Unit	112,399,800.00	1 Unit	109,102,600.00	4 unit	475,002,400.00		
				Jumlah kertas cek fisik yang diadakan	6500 Lembar	-	-	5500 Lembar	27,500,000.00	6000 Lembar	30,000,000.00	8000 Lembar	40,000,000.00	9000 Lembar	45,000,000.00	8000 Lembar	40,000,000.00	36500 Lembar	182,500,000.00		
				Jumlah Kendaraan operasional yang terpelihara	0	-	-	8 Unit	54,600,000.00	8 Unit	54,600,000.00	8 Unit	54,600,000.00	8 Unit	54,600,000.00	8 Unit	64,600,000.00	40 unit	283,000,000.00		
		2.15.02.2,05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaran Bermotor				58,880,000.00		198,000,000.00		97,518,800.00		170,000,000.00		190,000,000.00		198,000,000.00		853,518,800.00		

				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Paket	1 Paket	58,880,000.00	1 Paket	198,000,000.00	1 Paket	97,518,800.00	1 Paket	170,000,000.00	1 Paket	190,000,000.00	1 Paket	198,000,000.00	5 Paket	853,518,800.00		
		2.15.02.2,06	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Persentase manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai standard			440,304,000.00		2,615,000,000.00		1,115,726,400.00		881,232,000.00		1,223,928,200.00		1,357,900,000.00		7,193,786,600.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.02.2,06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			-		-			-		-		22,000,000.00		-		22,000,000.00		
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0									1 Dokumen	22,000,000.00			1 Dokumen	22,000,000.00		

		2.15.02.2,06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			17,520,000.00		2,615,000,000.00		1,020,726,400.00		812,232,000.00		1,031,928,200.00		1,282,900,000.00		6,762,786,600.00			
			Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas							43,634,400.00		25,100,000.00		10,800,200.00		10,800,200.00		90,334,800.00			
			Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan	45 unit	10 unit	17,520,000.00	3 Unit	6,000,000.00	50 unit	100,000,000.00	20 unit	50,000,000.00	8 unit	10,000,000.00	8 unit	10,000,000.00	78 unit	176,000,000.00			
			Jumlah Pagar pengaman jalan (Guardrail dan atau Delineator) yang diadakan	13 M						-	16 m	47,900,000.00	20 m	84,446,000.00			36 m	132,346,000.00			
			jumlah ATCS yang diadakan	0									-	1 paket	100,000,000.00			1 paket	100,000,000.00		
			Jumlah RPPJ diadakan	0	-		5 Unit	105,000,000.00							1 unit	13,000,000.00		118,000,000.00			

				Jumlah Traffic light yang diadakan	2 Unit					1 unit	216,000,000.00	1 unit	200,000,000.00			1 unit	200,000,000.00	3 unit	616,000,000.00			
				Jumlah Warning Light yang diadakan	1 Unit					1 unit	40,000,000.00	1 unit	40,000,000.00	1 unit	40,000,000.00	1 unit	40,000,000.00	3 unit	160,000,000.00			
				Jumlah PCTL (Pelican/ Pedestrian Crossing Traffic Light)	0											1 unit	90,000,000.00	1 unit	90,000,000.00			
				jumlah pengadaan Paku Marka	0								150 buah	65,000,000.00				150 buah	65,000,000.00			
				Jumlah pengadaan Cermin Tikung, Traffic Cone, Water Barrier	0							4 buah	10,000,000.00					4 buah	10,000,000.00			
				Jumlah pengadaan EWS/ Perlintasan sebidang	0					1 unit	185,000,000.00							1 unit	185,000,000.00			
				Jumlah pengadaan Zoos / Rass/ Jalur Khusus sepeda	0								1 paket	180,000,000.00				1 paket	180,000,000.00			
				Jumlah pemeliharaan operasional kendaraan pendukung kegiatan	0	-		-	1 unit	10,000,000.00	1 unit	10,000,000.00	1 unit	10,000,000.00	1 unit	10,000,000.00	1 unit	10,000,000.00	5 unit	50,000,000.00		

			Jumlah ATCS yang dipelihara	0					1 Paket	75,000,000.00	1 Paket	50,000,000.00	1 Paket	75,000,000.00		-	3 Paket	200,000,000.00		
			Jumlah pemeliharaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang elektronik	0					1 Paket	25,000,000.00	1 Paket	25,000,000.00	1 Paket	25,000,000.00	3 Paket	25,000,000.00	1 Paket	100,000,000.00		
			Jumlah pengadaan pendukung pengoperasian angkutan umum dijalan	0										1 unit	350,000,000.00	1 unit	350,000,000.00			
		2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota			95,380,000.00		-		90,000,000.00		50,000,000.00		85,000,000.00		70,000,000.00		295,000,000.00		

				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	1 Kali	1 Kali	95,380,000.00	-	1 Kali	90,000,000.00	1 Kali	50,000,000.00	1 Kali	50,000,000.00	1 Kali	40,000,000.00	4 Kali	230,000,000.00		
				jumlah sosialisasi keselamatan transportasi perlintasan sebidang	0									-	1 Kali	5,000,000.00	1 Kali	5,000,000.00		
				Jumlah penyediaan papan himbauan	2 Unit							-	4 unit	35,000,000.00	4 unit	25,000,000.00	8 unit	60,000,000.00		
		2.15.02.2,06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota				327,404,000.00	-		-		14,000,000.00		80,000,000.00		-		94,000,000.00		
				Jumlah alat pendukung sosialisasi	0		-	-		-		-	3 unit	15,000,000.00		-	3 unit	15,000,000.00		

				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0					-	30 unit	14,000,000.00				-	38 unit	14,000,000.00				
				Jumlah even keselamatan transportasi	0	1 kali	327,404,000.00					-	1 kali	65,000,000.00				1 kali	65,000,000.00			
		2.15.02.2,06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota							5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00				5,000,000.00		20,000,000.00		
				Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						3 kali	5,000,000.00	3 kali	5,000,000.00	3 kali	5,000,000.00	3 kali	5,000,000.00	3 kali	20,000,000.00			
		2.15.02.2,07	Persetujuan hasil analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota	persentase ijin rekomtek andalalin yang diterbitkan tepat waktu			-			39,600,000.00		45,000,000.00		35,000,000.00		85,000,000.00		55,000,000.00		259,600,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi

		2.15.02.2,07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin				-	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		150,000,000.00			
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	0			1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	30,000,000.00	5 dokumen	150,000,000.00		
		2.15.02.2,07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin				-	9,600,000.00		15,000,000.00		5,000,000.00		25,000,000.00		5,000,000.00		59,600,000.00			
				Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Kali			3 kali	9,600,000.00	3 kali	15,000,000.00	1 kali	5,000,000.00	5 kali	25,000,000.00	1 Kali	5,000,000.00	11 kali	59,600,000.00		
		2.15.02.2,07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				-	-		-		-		-		5,000,000.00		5,000,000.00			
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0										1 Orang	5,000,000.00	1 Orang	5,000,000.00			
		2.15.02.2,07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin				-	-		-		-		30,000,000.00		15,000,000.00		45,000,000.00			
				Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0								1 dokumen	30,000,000.00	1 dokumen	15,000,000.00	1 dokumen	45,000,000.00			

		2.15 .02. 2,08	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum			-		342,200,00 0.00		436,958,0 00.00		739,268,00 0.00		366,625,0 00.00		357,800,00 0.00		2,242,851,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.02.2,08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			-		98,912,000.00		166,800,000.00		534,800,000.00		144,625,000.00		109,800,000.00		1,054,937,000.00			
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	145 kali	-	145 kali	98,912,000.00	145 kali	166,800,000.00	145 kali	534,800,000.00	145 kali	144,625,000.00	145 kali	109,800,000.00	720 kali	1,054,937,000.00			
		2.15.02.2,08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota			-		243,288,000.00		179,158,000.00		172,468,000.00		189,000,000.00		173,000,000.00		956,914,000.00			

				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten /Kota	175 kali	-	-	165 kali	123,900,000.00	167 kali	127,208,000.00	140 kali	112,468,000.00	145 kali	129,000,000.00	165 kali	123,000,000.00	782 kali	615,576,000.00		
				Jumlah dokumen dan laporan koordinasi lomba WTN yang dilakukan	0	-	-	1 dokumen	119,388,000.00	1 dokumen	51,950,000.00	1 dokumen	60,000,000.00	1 dokumen	60,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	5 dokumen	341,338,000.00		
		2.15.02.2, 08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				-		-		91,000,000.00		32,000,000.00		33,000,000.00		75,000,000.00		231,000,000.00		
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						6 kali	25,000,000.00	6 kali	25,000,000.00	6 kali	25,000,000.00	6 kali	30,000,000.00	6 kali	105,000,000.00		

				Jumlah dokumen monev yang disusun	0	-	-	1 dokumen	6,000,000.00	1 dokumen	7,000,000.00	1 dokumen	8,000,000.00	1 dokumen	5,000,000.00	4 dokumen	26,000,000.00		
				Jumlah dokumen keselamatan transportasi	0									1 dokumen	40,000,000.00	1 dokumen	40,000,000.00		
				Jumlah peserta diklat PPNS	0			2 orang	60,000,000.00								60,000,000.00		
		2.15.02.2,09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase penumpang yang terlayani angkutan umum		86,412,000.00	49,390,000.00		913,390,000.00		913,390,000.00		913,390,000.00		921,000,000.00		3,710,560,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.02.2,09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			86,412,000.00	49,390,000.00		913,390,000.00		913,390,000.00		913,390,000.00		921,000,000.00		3,710,560,000.00		

				Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Tersedia	8 Unit	8 Unit	86,412,000.00	8 Unit	21,436,000.00	8 Unit	20,890,000.00	8 Unit	19,790,000.00	8 Unit	19,190,000.00	8 Unit	24,600,000.00	45 unit	105,906,000.00		
				Jumlah tenaga sopir ASG yang dibiayai	0		-		-	30 orang	864,000,000.00	30 orang	864,000,000.00	30 orang	864,000,000.00	30 orang	864,000,000.00	120 orang	3,456,000,000.00		
				Jumlah laporan hasil koordinasi dalam rangka arus balik lebaran	5 Laporan	-	-	5 Laporan	27,954,000.00	5 Laporan	28,500,000.00	5 Laporan	29,600,000.00	5 Laporan	30,200,000.00	5 Laporan	32,400,000.00	25 laporan	148,654,000.00		
		2.15.02.2,11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jaringan angkutan umum dalam kota yang berkualitas baik			39,313,000.00		236,724,000.00		214,724,000.00		244,724,000.00		260,000,000.00		228,724,000.00		1,184,896,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.02.2,11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				39,313,000.00		236,724,000.00		214,724,000.00		244,724,000.00		260,000,000.00		228,724,000.00		1,184,896,000.00		

				Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	0	1 Dokumen	39,313,000.00	1 Dokumen	61,724,000.00	1 Dokumen	61,724,000.00	1 Dokumen	91,724,000.00	1 Dokumen	95,000,000.00	1 Dokumen	61,724,000.00	5 dokumen	371,896,000.00		
				Jumlah Pengembangan SIM Bidang Angkutan	1 SIM	-	-	1 SIM	175,000,000.00	1 SIM	153,000,000.00	1 SIM	153,000,000.00	1 SIM	165,000,000.00	1 SIM	167,000,000.00	5 sim	813,000,000.00		
		2.15.02.2,12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pembinaan angkutan umum pedesaan			17,540,000.00		179,537,000.00		48,537,000.00		47,555,800.00		55,000,000.00		48,537,000.00		379,166,800.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.02.2,12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota				17,540,000.00		179,537,000		48,537,000		47,555,800		55,000,000		48,537,000		379,166,800.00		

				Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kali	1 Kali	17,540,000.00	1 Kali	179,537,000.00	1 Kali	48,537,000.00	1 Kali	47,555,800.00	1 Kali	55,000,000.00	1 Kali	48,537,000.00	5 kali	379,166,800.00		
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	jumlah penumpang yang terlayani angkutan	0%	-	-	25%	25,000,000.00	26.50%	25,000,000.00	27%	25,000,000.00	27.5%	110,000,000.00	28%	25,000,000.00	28%	210,000,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.03.2,13	Pembangunan dan Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Prosentase sarana dan prasarana penyebrangan sungai dalam kondisi baik			-		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		110,000,000.00		25,000,000.00		210,000,000.00	Perhubungan	Kab Ngawi
		2.15.03.2,13.03	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau				-		-		-		-		25,000,000.00		-		25,000,000.00		
				Jumlah rehab perahu	0		-		-		-		-	4 unit	25,000,000.00		-	4 unit	25,000,000.00		

		2.15.03.2, 13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau				-		-		-			25,000,000.00			-		25,000,000.00			
				Jumlah trap penyebrangan yang dibangun	0		-		-		-		4 lokasi	25,000,000.00			-		4 lokasi	25,000,000.00		
		2.15.03.2, 13.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				-		25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		60,000,000.00		25,000,000.00		160,000,000.00			
				Jumlah koordinasi dan pengawasan	0			1 kali	10,000,000.00	1 kali	10,000,000.00	1 kali	10,000,000.00	2kali	20,000,000.00	1 kali	10,000,000.00	5 kali	60,000,000.00			
				Jumlah dokumen trap penyebrangan	0	-	-	1 Paket	15,000,000.00	1 Paket	15,000,000.00	1 Paket	15,000,000.00	1 Paket	15,000,000.00	1 Paket	15,000,000.00	5 Paket	75,000,000.00			
				Jumlah izin yang dikeluarkan (SKK . SKB)	0		-		-		-		-	1 dokumen	25,000,000.00			-	1 dokumen	25,000,000.00		